

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

ANNISA MAHARDHIKA PUTRI

8105128000



Laporan Praktek Kerja Lapangan Ini Ditulis Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Mendapatkan **Gelar Sarjana Pendidikan** Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN EKONOMI

KONSENTRASI EKONOMI KOPERASI

JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2015

ABSTRAK

Annisa Mahardhika Putri 8105128000 Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Koperasi Pegawai Setjen DPR RI. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Mei 2015.

Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh praktikan bertempat di Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Pelaksanaan PKL selama satu bulan terhitung sejak tanggal 5 Januari – 30 Januari 2015.

Tugas praktikan selama PKL meliputi menjadi kasir di Toserba dan Pujasera Koperasi serta staff peminjaman yang bertugas untuk mencatat data nasabah, menghitung kelayakan gaji nasabah untuk membayar cicilan, dan menginformasikan kepada nasabah mengenai pencairan dananya. Dari pelaksanaan PKL tersebut praktikan mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai dunia kerja, khususnya di Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam laporan ini diterangkan penempatan praktikan pada Unit Usaha Riil dan Unit Simpan Pinjam serta membahas secara detail mengenai profil tempat praktikan melaksanakan PKL, ranah kerja, tugas-tugas, dan hambatan praktikan selama masa PKL.

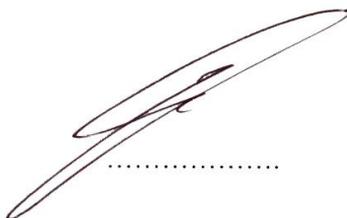
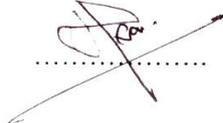
LEMBAR PENGESAHAN

KETUA JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si

NIP. 19661030 200012 1 001

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji		
<u>K. Dianta. A. S., S.IP., M.E.</u>		6-7-2015
NIP. 19800924 200812 1 002		
Penguji Ahli	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Suparno, M.Pd.</u>		6-7-2015
NIP. 19790820 201404 2 001		
Dosen Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. I Ketut. R. Sudiarditha, M.si</u>		2-7-2015
NIP. 19560207 198602 1 001		

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR

Judul : **LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA KOPERASI
PEGAWAI SETJEN DPR RI**

Nama Praktikan : Annisa Mahardhika Putri

Nomor Registrasi : 8105128000

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Menyetujui,

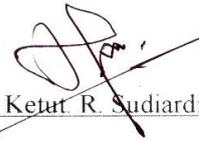
Ketua Program Studi



Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si.

NIP. 19720114 199802 2 001

Pembimbing



Dr. I. Ketut R. Sudiarditha, M.Si

NIP. 19560207 198602 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi



Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si

NIP. 19661030 200012 1 001

Seminar pada Tanggal :

(diisi oleh Ketua Konsentrasi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dengan tepat waktu dan tanpa kendala yang berarti.

Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini merupakan hasil yang diperoleh penulis selama melaksanakan praktik kerja di Koperasi Pegawai Setjen DPR RI. Penyusunan laporan PKL ini dapat diselesaikan atas bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun materill dalam penulisan laporan PKL ini;
2. Dr. I Ketut. R. Sudiarditha, M.Si selaku Dosen pembimbing;
3. Drs. Dedi Purwana.E.S, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan pembimbing kegiatan PKL penulis;
4. Drs. Nurdin Hidayat, MM., M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi;
5. Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si selaku ketua program Pendidikan Ekonomi;
6. Karunia Dianta A. Sebayang, ME selaku ketua konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi;
7. Bapak Drs. Mohammad Djazuli, M.Si selaku ketua Koperasi Pegawai Setjen DPR RI;

8. Bapak Cucu Wahyu Zakaria, S.E. selaku Manager Unit Usaha Riil serta pembimbing Praktikan di Koperasi Pegawai Setjen DPR RI;
9. Seluruh teman-teman di Fakultas Ekonomi, khususnya konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan laporan Praktik Kerja Lapangan. Penulis juga mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca di waktu yang akan datang.

Jakarta, Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR EKSEKUTIF	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang PKL	1
B. Maksud dan Tujuan PKL	2
C. Kegunaan PKL	4
D. Tempat PKL	5
E. Jadwal Waktu PKL	5
 BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL	
A. Sejarah Koperasi	8
B. Struktur Organisasi	16
C. Kegiatan Umum Perusahaan	19
 BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	
A. Bidang Kerja	36
B. Pelaksanaan Kerja	37
C. Kendala yang Dihadapi	42

D. Cara Mengatasi Kendala	43
---------------------------------	----

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan

Globalisasi menuntut adanya perkembangan sumber daya manusia agar dapat bersaing dan berperan dalam dunia kerja. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka setiap mahasiswa harus memiliki keterampilan, kemampuan dasar serta wawasan yang luas agar dapat bersaing secara kompeten. Perguruan tinggi berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang tangguh, berwawasan luas, dan mampu beradaptasi dengan dunia kerja. Akan tetapi dalam kegiatan perkuliahan sehari – hari yang didapat oleh hampir sebagian besar mahasiswa adalah berupa teori, oleh karena itu dibutuhkan praktek agar dapat memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja secara lebih dini sehingga diharapkan ketika lulus mahasiswa akan menjadi lulusan yang mempunyai gambaran tentang kondisi dunia kerja serta permasalahan yang akan dihadapi.

Untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai dunia kerja bagi para mahasiswa. Fakultas Ekonomi UNJ memberikan keterampilan melalui Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dalam suatu koperasi. Praktek Kerja Lapangan merupakan suatu kegiatan penerapan ilmu yang diperoleh mahasiswa dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan. Yang bertujuan untuk melatih mahasiswa agar mengenal situasi

dunia kerja sekaligus untuk meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah meneliti serta ikut berpartisipasi langsung dengan mengikuti semua aktifitas di lokasi PKL. kegiatan ini sesuai dengan kurikulum program Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), bahwa pada semester tujuh, setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan kegiatan PKL yang mempunyai bobot 2 sks.

Tempat praktikan melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan yaitu pada Koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Praktikan memilih Praktek Kerja Lapangan di Koperasi Setjen DPR RI karena Koperasi Setjen DPR RI merupakan lembaga keuangan non bank dan organisasi bisnis yang operasikan oleh orang-seorang untuk kepentingan bersama. Alasan praktikan memilih Koperasi Setjen DPR RI karena pernah mendapatkan penghargaan dari Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) sehingga dapat dikategorikan sebagai koperasi yang berhasil serta praktikan ingin menambah informasi seputar dunia kerja agar dapat mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

B. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Maksud diadakannya kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang diterapkan oleh Universitas Negeri Jakarta ini adalah:

1. Meningkatkan dan memperluas keterampilan yang dimiliki dalam dunia kerja.

2. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja.
3. Sebagai masukan dan umpan balik guna perbaikan dan pengembangan pendidikan.
4. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapatkan di kegiatan perkuliahan dengan kenyataan dunia kerja.
5. Agar terpenuhinya salah satu mata kuliah wajib, terutama bagi praktikan yang merupakan mahasiswa dari Jurusan Ekonomi dan Administrasi Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi.

Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan, antara lain:

1. Memperluas wawasan mahasiswa terhadap jenis – jenis pekerjaan pada tempat dimana mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
2. Menghasilkan tenaga kerja yang dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan tuntutan lapangan kerja saat ini.
3. Menyiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas karena memiliki pengetahuan, keterampilan serta keahlian sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini.

C. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan

Dengan diadakannya kegiatan Praktek Kerja Lapangan, didapat beberapa manfaat yang bisa diambil oleh pihak – pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Koperasi
 - a. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara koperasi dengan perguruan tinggi.
 - b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak – pihak yang terlibat.
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa.
 - b. Mengaplikasikan teori – teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.
 - c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, percaya diri, dan disiplin untuk mahasiswa.
3. Bagi Fakultas Ekonomi-UNJ
 - a. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara koperasi dengan universitas, khususnya FE UNJ
 - b. Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan mengaplikasikan pelajaran yang telah dipelajari pada kegiatan perkuliahan di lingkungan kampus sebagai bahan evaluasi.

D. Tempat Praktek Kerja Lapangan

Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

Nama Instansi / Koperasi : Koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Telepon : (021) 5715740,
(021) 5715451,
(021) 57115914.
Faksimile : (021) 5715540
Website : <http://koperasi.dpr.go.id>
Email : koperasi@dpr.go.id

E. Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan

Waktu praktek kerja lapangan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2015. Adapun rincian tahapannya, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari informasi tentang beberapa koperasi yang member kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan praktek kerja lapangan.

Setelah itu praktikan mengambil keputusan untuk mendaftar di Koperasi Setjen DPR RI dimana koperasi tersebut merupakan tempat praktikan melaksanakan observasi untuk mata kuliah ekonomi koperasi. Setelah memutuskan, praktikan

mengurus surat permohonan izin pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) yang ditujukan kepada kepala divisi SDM (Sumber Daya Manusia) Koperasi Setjen DPR RI.

Setelah surat permohonan selesai dibuat oleh BAAK UNJ, kemudian surat permohonan izin praktek kerja lapangan tersebut diserahkan kepada kepala divisi SDM Koperasi Setjen DPR RI yang selanjutnya akan memberikan kepastian kepada praktikan untuk dapat melaksanakan praktek kerja lapangan di Koperasi Setjen DPR RI.

2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan PKL di Koperasi Setjen DPR RI dimulai tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2015, yang dilaksanakan mulai hari Senin, 5 Januari 2015 dan kemudian dilanjutkan sesuai dengan hari kerja, yakni:

- Hari Kerja : Senin – Kamis
Pukul : 08.00 – 16.30
- Hari Kerja : Jumat
Pukul : 08.00 – 17.00

3. Tahap Pelaporan

Setelah menyelesaikan praktik kerja lapangan pada tanggal 5 Januari 2015, praktikan mulai menulis laporan setelah pelaksanaan praktek kerja lapangan, dimulai sejak pertengahan

Februari 2015 sampai dengan akhir bulan Februari 2015. Hal ini dilakukan demi penyempurnaan (baik isi laporan maupun lampiran – lampiran yang diperlukan untuk mendukung kesempurnaan laporan).

Tabel I.1: Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan

Bulan / Tahap	Desember	Januari	Februari
Persiapan			
Pelaksanaan			
Pelaporan			

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Koperasi

Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1985 dan didaftarkan ke Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi DKI Jakarta dengan No. 2027a/B.H./I. tanggal 31 Januari 1985. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI telah disesuaikan dengan undang-undang tersebut. Perubahan tersebut telah disahkan dengan SK Kepala Kanwil Koperasi DKI Jakarta No. 55/PH/Y/VIII/1994 tanggal 15 Agustus 1994.

Perubahan selanjutnya terhadap Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2003, sesuai keputusan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2002 dengan prioritas pada sistem pemupukan Modal Sendiri Koperasi melalui peningkatan nominal Simpanan Wajib yang proporsional dan Simpanan Pokok untuk anggota baru.

Namun karena pertumbuhan koperasi yang demikian cepat serta adanya keinginan kuat untuk menetapkan landasan-landasan kerja dalam

membangun sistem koperasi yang bersih, akurat, dan memiliki kepekaan terhadap keinginan dan perubahan yang terjadi atau yang kita kenal dengan motto kinerja Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI CAR (*Clean, Accurate, Respectfull*) maka pada saat pelaksanaan Rapat Anggota Khusus tahun 2004 telah dilaksanakan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan prioritas pada pembangunan sistem organisasi koperasi. Kemudian tindak lanjut daripada perubahan tersebut, pada tahun 2005 disusun sistem demokrasi dalam berkoperasi secara bertahap yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Khusus Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI nomor 1 Tahun 2005 tentang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Koperasi/Ketua dan Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada tahun 2006 konsep inovatif tersebut dilaksanakan secara bersamaan untuk pemilihan langsung pengurus dan pengawas. Kemudian berlanjut pada tahun 2009 dilakukan pemilihan langsung pengawas koperasi periode tahun 2009-2012 serta melakukan pemilihan langsung pasangan calon pengurus koperasi periode tahun 2010-2014.

Pada tahun 2011, Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dalam forum Rapat Anggota Khusus telah membentuk Panitia Pemilihan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI untuk periode tahun 2012-2015. Berdasarkan usulan dan rumusan Panitia Pemilihan melalui surat nomor 04/PP.Pengawas/I/2012 tentang Usulan Perubahan Peraturan Khusus

Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 1 Tahun 2005, Pengurus bersama Pengawas melakukan pembahasan yang kemudian menetapkan Peraturan Khusus Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengurus dan Ketua dan Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI.

Seiring dengan hasil uji materi Mahkamah Konstitusi yang kemudian membatalkan diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dengan demikian penyusunan dan pembahasan rancangan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang semula akan dirubah untuk disesuaikan dengan berbagai perubahan yang terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan.

Dalam penyelenggaraan Rapat Anggota Khusus Tahun 2014, telah dibahas dan diputuskan adanya perubahan Anggaran Dasar yang kemudian ditetapkan dalam paripurna Rapat Anggota Khusus di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2014. Sesuai dengan tuntutan keinginan anggota dan konteks dinamika pengelolaan badan usaha koperasi dan tentunya disesuaikan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 telah dilakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dengan menambahkan 3 (tiga) angka pada huruf h, yaitu angka 3, angka 4, dan angka 5 sehingga Pasal 4 berbunyi:

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Koperasi melakukan kegiatan dan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Mewajibkan Anggota untuk menyimpan secara teratur pada Koperasi;
- b. Menyelenggarakan usaha simpan pinjam untuk Anggota dengan tingkat jasa yang layak;
- c. Mengusahakan barang-barang primer maupun sekunder yang dibutuhkan oleh Anggota;
- d. Mengusahakan kelebihan kemampuan pelayanan koperasi bagi bukan Anggota;
- e. Mengusahakan perumahan bagi Anggota;
- f. Menghimpun dan memasarkan produksi yang dihasilkan oleh Anggota;
- g. Mengadakan kerja sama antara Koperasi dengan pihak lain, Pengusaha Swasta, BUMN, Pemerintah dalam bidang usaha yang saling menguntungkan; dan/atau
- h. Melakukan usaha di bidang:
 1. Jasa cleaning service, perbengkelan, sarana transportasi, biro perjalanan, penerbitan/percetakan, perawatan komputer dan jaringan komputer, serta jasa lainnya.
 2. Pengadaan alat tulis kantor/alat rumah tangga kantor, komputer, dan pengadaan barang lainnya.
 3. Jamuan rapat/*cattering service*.
 4. Pengadaan peralatan instalasi.
 5. Jasa pengelolaan gedung serba guna.

6. Jasa pengelolaan lahan usaha.

Konsistensi aplikasi dari motto kinerja Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Koperasi untuk tahun buku 2014 yang merupakan tahun kelima pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga independen dari Kantor Akuntan Publik. Selain pemeriksaan dan pengendalian internal dari Pengawas secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Koperasi menjaga akuntabilitasnya melalui audit terhadap hasil penyusunan laporan keuangan serta penataan kembali sistem pembukuan koperasi yang kemudian melanjutkan dengan aplikasi komputerisasi yang secara bertahap telah mengalami kemajuan yang demikian mendukung baik terhadap layanan informasi anggota maupun terhadap pengendalian internal yang dilakukan oleh anggota sebagai salah satu perangkat organisasi dalam koperasi. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Buku 2014 sebagaimana kami sampaikan pada Laporan Auditor Independen dalam BAB IV Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. Adapun opini Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan telah memberikan opini bahwa, kecuali dampak Koperasi belum menerapkan imbalan pasca kerja sesuai dengan Bab 23 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, laporan keuangan koperasi dinyatakan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada

tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Hasil penilaian tersebut ada peningkatan, diaman pengecualian telah berkurang satu poin, yaitu terkait pengakuan hutang pajak. Hal tersebut sebagai konsekwensi Pengurus dan Pengawas didalam menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Adapaun berkenaan dengan Imbalan Pasca kerja, Koperasi masih memandang belum selayaknya diterapkan baik mengingat produktivitas pegawai dalam penciptaan keuntungan maupun dalam hal kualitas layanan yang diterima anggotanya.

Pemeriksaan dan supervisi dilaksanakan pula yang kemudian dibahas dalam evaluasi melalui Rapat Gabungan per triwulan. Mekanisme pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi dilakukan juga melalui pengendalian internal yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi Pegawai Setjen DPR RI baik berupa pemeriksaan administratif maupun Kunjungan Lapangan (KUNLAP). Berkenaan dengan akuntabilitas koperasi khususnya dalam hal ekuitas yang bersumber dari pemupukan modal sendiri, pada tahun 2014 semakin baik dengan adanya aplikasi komputerisasi yang dibuat dengan bantuan tim dari Bidang Data dan Sarana informasi Sekretariat Jenderal DPR RI serta bantuan pimpinan P3DI untuk memanfaatkan jaringan intranet melalui portal pegawai. Bersamaan dengan peningkatan transparansi pengelolaan koperasi, terdapat peningkatan jumlah simpanan wajib anggota sesuai dengan hasil Rapat Anggota Khusus pada Tahun 2014. Kondisi ini semakin mempermudah koperasi dalam melakukan sosialisasi dan menyerap

aspirasi anggota terkait keberadaan koperasi, dan disisi lain peningkatan layanan yang bersumber dari modal sendiri koperasi semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian Sisa Hasil Usaha pada Tahun 2014 yang meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi kebijakan tersebut tentu belum dapat memenuhi harapan anggota secara keseluruhan, karena tanpa penyertaan modal dari lembaga perbankan sebagai upaya optimalisasi modal sendiri menjadikan koperasi harus bekerja ekstra keras dalam mengatur *cash flow* dalam memenuhi pembiayaan pinjaman yang pada umumnya meningkat sebagai akibat adanya peningkatan pendapatan anggota pada tahun 2014. Disamping adanya peningkatan permintaan terhadap pinjaman dengan nominal yang besar, selama satu semester tahun buku 2014 terjadi keterlambatan pengembalian angsuran yang bersumber dari pendapatan diluar gaji. Kedua hal yang menjadi pertimbangan pengaturan *cash flow* koperasi, kemudian ditambah dengan adanya penarikan dari sebagian besar anggota atas simpanan sukarela yang awalnya bersumber dari Sisa Hasil Usaha yang selama ini tidak diambil. Anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa layanan koperasi tentu memahami kesulitan bersama tersebut. Kerja sama dan kerja keras seluruh perangkat organisasi koperasi telah mampu menyelesaikan masa-masa sulit tersebut. Dengan demikian kita semakin yakin bahwa eksistensi dan pengembangan koperasi akan berhasil guna dan berdaya guna apabila partisipasi aktif anggota dapat terjaga dan terus ditingkatkan.

Adapun penghargaan-penghargaan yang pernah diterima oleh koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI diantaranya :

1. Tahun 2003 Koperasi terbaik ke IV versi Pusat Koperasi Pegawai RI wilayah DKI Jakarta
2. Bulan Juni 2008 Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI telah terpilih pada urutan ke 22 sebagai koperasi besar pada seleksi 100 koperasi terbesar tingkat DKI Jakarta
3. Urutan ke 83 tingkat nasional versi majalah PIP
4. Juli 2009 Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI menerima dua penghargaan tertinggi di Indonesia atas kiprah pembangunan KUKM berupa KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL dan Koperasi Penerima Award Tahun 2009 serta JASA BHAKTI KOPERASI 2009 untuk Ketua Koperasi yang mana kedua penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM pada peringatan puncak Hari Koperasi ke 62 di Samarinda Kalimantan Timur pada tanggal 15 Juli 2009;
5. Pada bulan April 2010 mendapatkan Sertifikasi Pemeringkatan untuk Unit Usaha Simpan Pinjam dari PT. Sucofindo dengan peringkat BB (Very Good) melalui sertifikat nomor : 100111.03.002.00003 tanggal 28 April 2010.
6. Desember 2010 berhasil menjadi 3(tiga) besar Finalis BSM UKM Awards tingkat Nasional.
7. Juni 2012, telah ditetapkan sebagai Koperasi Primer Terbaik Tahun 2012 dan menempati urutan kelima hasil penilaian Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

8. Desember 2012 terpilih sebagai 20 Finalis Tingkat Nasional dan kemudian berhasil meraih BSM UMKM AWARD Tahun 2012 sebagai Koperasi Terbaik tingkat Nasional untuk kategori Koperasi Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD/TNI/POLRI/PNS.

B. Struktur Organisasi

1. Badan Pembina

Ketua Pembina	: Sekretaris Jenderal DPR RI
Wakil Ketua Pembina	: Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI
Sekretaris Pembina	: Ketua KORPRI Sekretariat Jenderal DPR RI

2. Susunan Pengurus

Ketua	: Drs Mohammad Djazuli, M.Si.
Wakil Ketua	: Hariyadi, S.IP., MPP.
Sekretaris	: M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H.
Bendahara	: Martiasih Nursanti, S.E., M.E.
Bidang Usaha	: Ade Efendi, S.Sos., M.M.

3. Susunan Pengawas

Ketua	: Drs. Djaka Dwinarko, M.Si.
Wakil Ketua	: Drs. Urip Soedjarwono
Anggota	: Saeful Anwar, S.IP., M.E.

4. Jumlah Pengelola

19 Orang Karyawan Tetap :

- 2 Orang Manager
- 3 Orang Kepala Bidang
- 3 Orang Administrasi USP
- 3 Orang Kepala Unit USR
- 2 Orang Kasir
- 3 Orang Toserba
- 3 Orang Pujasera

8 Orang Karyawan Tidak Tetap :

- 1 Orang di Cafeteria Wisma Griya Sabha
- 5 Orang di Mini Market Kalibata
- 2 Orang di Pujasera

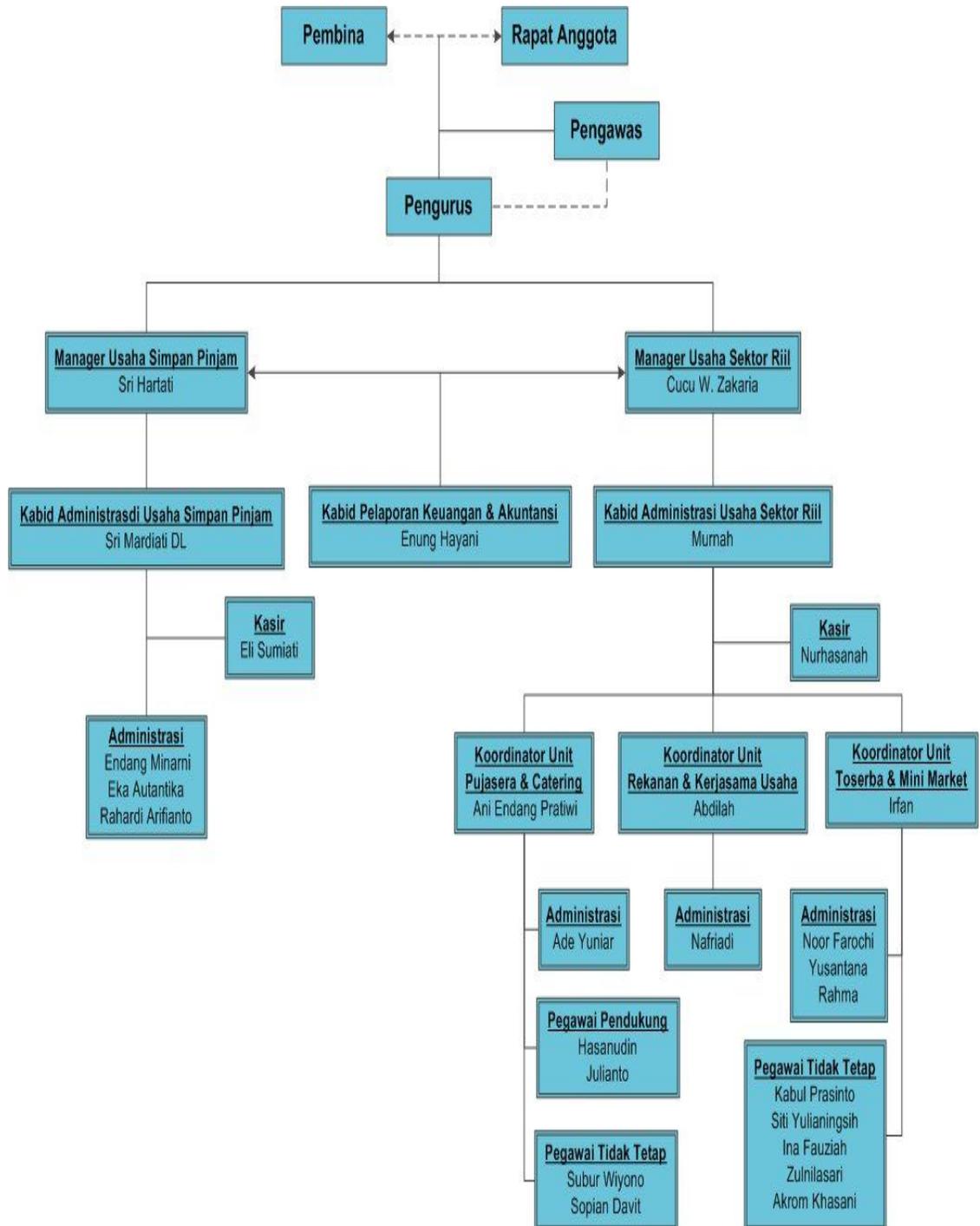
5. Jumlah Anggota

1.345 orang

6. Jumlah Anggota Luar Biasa

19 Orang

Adapun Struktur organisasi Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI tahun 2014 – 2015:



C. Kegiatan Umum Koperasi

Kegiatan umum usaha koperasi dibagi menjadi dua bagian berdasarkan sasaran pelayanannya, yaitu kegiatan usaha yang berhubungan dengan Anggota saja dan usaha yang berhubungan juga dengan Non Anggota. Kegiatan yang berhubungan murni dengan Anggota adalah pada Unit Simpan Pinjam dan Perdagangan Kredit. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan Anggota dan Non Anggota adalah Toko Koperasi, Percetakan dan Copy Centre, Travel, Cafeteria Wisma Griya Sabha, Pujasera dan Mini Market Kalibata. Sedangkan kegiatan usaha yang sama sekali tidak berhubungan dengan anggota yaitu pengadaan barang dan jasa dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, namun dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada keberpihakan anggota dalam konteks partisipasi kewenangan pengambilan kebijakan dan keputusan sesuai dengan proporsinya. Secara umum masing-masing aktivitas unit usaha-usaha yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. UNIT SIMPAN PINJAM (USP)

Masih mengacu pada UU RI nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan pendukungnya berupa Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam, dan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia No. 226/KEP/M/V/1996 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan No. 227/KEP/M/V/1996 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

Kegiatan Unit Simpan Pinjam (USP) antara lain :

- Menghimpun simpanan Koperasi dan tabungan Koperasi dari anggota.
- Memberikan pinjaman kepada anggota.
- Dalam hal terdapat kelebihan dana, dapat ditempatkan dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau simpanan berjangka pada koperasi lain, saham, dan obligasi.

Sampai saat ini Unit Simpan Pinjam masih tetap merupakan *core bussines* Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Oleh karena itu konsentrasi pengelolaan pengurus lebih fokus pada Unit Usaha ini. Hal ini dilakukan mengingat disamping sebagai Unit Usaha yang memberikan kontribusi pendapatan yang tinggi terhadap pendapatan koperasi, kondisi kompetisi yang semakin ketat dengan lembaga keuangan, dan memiliki kandungan resiko yang tinggi (*high risk*) yang dikarenakan adanya amanah penyertaan modal dari pihak ketiga yang jumlah milyaran rupiah serta menjadi indikator utama kualitas layanan koperasi terhadap anggotanya. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pinjaman anggota yang semakin beragam, Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI telah menetapkan 2 (dua) kategori Pinjaman berdasarkan sumber permodalannya, yaitu sebagai berikut:

1. Pinjaman yang bersumber dari Modal Sendiri.

- 1.1. Pinjaman Reguler adalah jenis pinjaman yang disediakan Unit Simpan Pinjam untuk anggota dan anggota luar biasa koperasi yang pembiayaannya bersumber dari modal sendiri. Pinjaman ini

merupakan pinjaman jangka pendek dengan jasa yang rendah yaitu sebesar 0,7% setiap bulannya

1.2 Pinjaman Reguler Plus adalah jenis pinjaman produk baru pada tahun 2014 untuk anggota dan anggota luar biasa koperasi yang merupakan pinjaman jangka menengah dengan maksimal tenor 60 bulan dan jasa setiap bulannya sebesar 1%.

2. Pinjaman yang bersumber dari Modal Penyertaan (Modal Asing).

Pinjaman-pinjaman yang disediakan Unit Simpan Pinjam untuk anggota dan anggota luar biasa koperasi yang bersumber dari modal penyertaan perbankan terdiri dari:

2.1. Pinjaman Insidentil (Multiguna), yaitu jenis pinjaman tanpa agunan dengan nilai plafond maksimal sebesar Rp. 150.000.000,- dan tenor maksimal 96 bulan dengan penerapan besaran jasa pinjaman sebesar 1,1% setiap bulannya;

2.2. Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (Pembiayaan Pembelian Rumah & Kavling), yaitu jenis pinjaman dengan agunan dengan nilai plafond maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- dan tenor maksimal 180 bulan;

2.3. Dana Talangan Haji, yaitu pinjaman tanpa jasa untuk pembiayaan dalam rangka mendapatkan nomor kursi pemberangkatan ibadah haji dengan plafond maksimal sebesar Rp. 22.500.000,- dan tenor maksimal 36 bulan. Dalam hal ini koperasi hanya menerima fee

ujrah untuk setiap tahunnya yang jumlah ditetapkan oleh Bank Penyelenggara yang merupakan mitra kerja koperasi.

Pertumbuhan kedua kategori pinjaman tersebut dalam beberapa tahun terakhir meningkat hanya saja pada tahun 2014 ini menurun dari tahun sebelumnya. Pinjaman regular dan regular Plus pada tahun 2013 Rp.29.772.050.000 dan pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi Rp.2.653.000.000. Perununan tersebut juga diikuti untuk Pinjaman yang bersumber dari dimana pada tahun 2013 sebesar Rp.5.523.500.000 dan pada tahun 2014 turun menjadi Rp.3.825.000.000

b. TOKO KOPERASI (TOSERBA)

Perdagangan barang yang dilakukan dengan swakelola ini merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari Anggota dan Non Anggota baik secara tunai maupun secara kredit (khusus Anggota). Wujud kegiatan ini dalam bentuk pengelolaan Toko Koperasi atau populis dengan istilah Toko Serba Ada (TOSERBA) yang berlokasi dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan fungsi utamanya menyediakan barang-barang konsumsi kebutuhan anggota. Adapun yang dimaksud dengan swakelola disini adalah jenis pengelolaan perdagangan yang dilakukan sendiri mulai dari proses pembelian, penjualan, penatausahaan dan termasuk penggunaan *software retail*. Pada tahun 2014 ini secara bertahap mengalami kemajuan dalam aktivitas usaha baik dalam bentuk kenyamanan pelayanan, keragaman produk sebagai akibat

pemanfaatan ruang dari perluasan toko dibagian belakang. Dan pada semester II Tahun 2014, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung serta peningkatan pendapatan melalui diversifikasi usaha, Pengurus telah membuka *Coffee Shop* didepan ruang usaha TOSERBA. Tentu perubahan tersebut diharapkan berimplikasi pula terhadap peningkatan pelayanan kepada anggota dan media promosi kepada non anggota untuk mengenal dan mau berbelanja di TOSERBA. Pada tahun buku 2014 kegiatan usaha TOSERBA telah memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 1.890.358.542,00 atau naik sebesar Rp. 414.073.877,00 atau naik 28,04% dari tahun sebelumnya. Pendapatan sebesar itu sudah termasuk hasil daripada penjualan barang non toko atau barang konsinyasi yang nilainya sebesar Rp. 697.608.461,00.

c. PUJASERA

Unit Pujasera merupakan suatu kegiatan usaha dalam pelayanan tata boga kepada Anggota dan non Anggota yang bekerjasama dengan para pedagang sebagai mitra binaan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang pada tahun 2013 meliputi 17 (tujuh belas) counter dan 5 (lima) non counter. Dalam perjalanannya setelah lima tahun melayani anggota dan pengguna jasa lainnya serta sesuai tahapan pengembangannya sejak dibuka pada tanggal 29 tahun 2003, pada tahun 2008 Pujasera secara administratif telah menjadi bagian yang utuh dari kegiatan Koperasi secara keseluruhan. Implikasi dari hal itu, sejak tahun

2009 Pujasera telah menjadi bagian dari pengembangan program kerja baik aspek pengembangan usaha maupun Sumber Daya Manusia-nya. Pada tahun buku 2014, kegiatan usaha unit pujasera (termasuk didalamnya kegiatan *catering service*) telah memberikan kontribusi keuntungan terhadap Koperasi sebesar Rp.591.206.871,00. Kontribusi keuntungan tersebut berasal dari Komisi Penjualan retail sebesar Rp.360.107.541,00, Komisi Cattering Rp. 129.551.555,00, kontribusi counter dan non counter Rp. 98.650.000,00 serta Penjualan Minuman Dalam Kemasan (MDK) sebesar Rp. 2.897.775,00. Menjadi perhatian dalam perubahan yang signifikan dari kontribusi pendapatan keuntungan Penjualan minuman *soft drink* yang pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar Rp. 5.689.337,00 dan artinya pada tahun buku 2014 mengalami penurunan sebesar Rp.2.791.582,00 atau sebesar 49,07%.

Untuk meningkatkan kenyamanan dan keindahan tampilan counter-counter tanpa harus mengeluarkan biaya investasi sendiri, maka pada tahun 2011 Koperasi telah mengajukan permohonan bantuan kepada PT. Coca Cola Distributor Indonesia (PT. CDI) untuk melakukan *branding* pada *neon box* setiap counter-nya. Biaya pembuatan dan pemasangan ditanggung oleh PT. CDI ditambah dengan manfaat fasilitas khusus untuk pengadaan barang dagangan, prasarana *cooler* (lemari pendingin), fasilitas pembayaran secara kredit sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dan material promosi berupa kelengkapan pelayanan tataboga seperti tempat tissue,

asbak dan t-shirt untuk pramusaji setiap counter. Namun dalam perkembangannya, ada tuntutan dari pengguna jasa dan para pedagang untuk melengkapi produk minuman dalam kemasan diluar produk eksklusif, sehingga pada bulan oktober tahun 2013 koperasi tidak lagi mengikatkan diri untuk menjadi agen eksklusif PT. CDI. Dengan demikian Koperasi dapat menambah dengan minuman dalam kemasan lain dan termasuk didalamnya dapat meminta sponsorship kepada *stakeholder* lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam branding ruang layanan di Pujasera. Namun demikian sesuai program kerja selanjutnya rancangan pengembangan selanjutnya tentang distribusi minuman ini akan dikembangkan untuk pasar diluar pujasera yang meliputi para pedagang dan pengelola tempat makan dilingkungan DPR/MPR/DPR RI serta sudah dirancang untuk pro aktif dalam pemenuhan kebutuhan air mineral (botol ataupun galon) ke ruangan kerja dan jamuan rapat-rapat yang ada dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan demikian secara bertahap pada tahun depan hak eksklusif produk merk lainnya akan dapat diminta pula untuk menambah varian sebagai upaya memenuhi keinginan anggota dan minat pasar (*Marketing by order*) terhadap Minuman Dalam Kemasan (MDK).

d. PENGADAAN BARANG DAN JASA (REKANAN)

Unit usaha pengadaan barang dan jasa atau lebih dikenal dengan istilah rekanan merupakan kegiatan usaha Koperasi yang meliputi bidang perawatan dan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Sekretariat

Jenderal DPR RI. Kegiatan ini murni komersial meskipun dalam pelaksanaan kerjanya berhubungan dengan anggota koperasi sebagai pengguna barang dan jasa. Berkenaan dengan Sub Perawatan, pada tahun 2014 koperasi mengalami peningkatan kembali. Kondisi dan situasi tersebut akan menjadi pertimbangan untuk mencari solusi terobosan mengaktifkan komunikasi yang tentunya sangat berharap adanya partisipasi anggota terutama pengguna jasa pengadaan dan perawatan. Hasil yang belum memuaskan dalam bidang rekanan selama ini, sudah seharusnya menjadi evaluasi bersama baik tingkat Pengurus, Pengawas dan manajemen maupun di tataran anggota dalam kapasitasnya sebagai pengguna barang dan jasa dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pendidikan, latihan dan peningkatan SDM koperasi dalam bidang rekanan (Sistem Pengadaan Secara Elektronik/SPSE, *product knowledge*, pengetahuan berbagai ketentuan pendukung kegiatan, marketing dan teknik komunikasi), agar dapat bersaing dengan kompetitor yang ada dilingkungan Setjen DPR RI akan menjadi skala prioritas pada tahun depan.

Secara keseluruhan unit kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa masih belum sesuai yang diharapkan dalam konteks potensi pekerjaan yang ada. Dari sekian banyak potensi yang ada dan unit kerja yang memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran, baru sebagian kecil yang pada tahun 2014 melakukan transaksi nyata, dan pendapatan lainnya dari unit usaha ini berupa pemanfaatan untuk menggunakan jasa

penagihan saja. Dengan kendala tersebut, pengurus mencoba menambah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang/lahan untuk promosi *stakeholders* dilingkungan pujasera atau toko atau bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk tempat di depan Mandiri Prioritas. Naum pada akhir tahun kegiatan ini terkendala dengan adanya kebijakan penertiban tata ruang di lingkungan Gedung Nusantara II dan Nusantara III DPR RI.

Pada tahun 2014, kontribusi keuntungan unit kegiatan usaha rekanan ini mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 110.562.303,00 atau naik sebesar 68,54% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun mengalami prosentasi kenaikan diatas rata-rata, tentu ini bukan pencapaian yang yang sesuai ekspektasi pemilik koperasi yang jelas sebagiannya menjadi pengambil keputusan. Disisi lain Koperasi adalah badan usaha yang menjadi tuan rumah dan jelas dimiliki oleh anggota dalam hal ini pegawai negeri dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kondisi ini, dimana pendapatan yang bersumber dari rekanan yang masih kecil dibandingkan dengan potensi pendapatan yang dapat diterima terkait besaran anggaran belanja barang dan belanja modal dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, akan menjadi fokus konsolidasi Koperasi pada Tahun Anggaran berikutnya.

e. MINI MARKET KALIBATA

Unit Usaha yang baru berjalan 2(dua) tahun, yang merupakan tindaklanjut koperasi dalam konteks kepercayaan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memanfaatkan potensi pasar dalam mengadakan

layanan usaha untuk anggota DPR RI dan anggota koperasi yang ada dilingkungan Perumahan Jabatan Anggota DPR RI Kalibata. Pada tahun 2014 unit ini belum optimal karena adanya kekosongan yang cukup panjang sebagai akibat adanya pergantian keanggotaan DPR RI. Situasi ini dimanfaatkan pengurus untuk mengadakan pembenahan terhadap perangkat termasuk Sumber Daya Manusianya. Evaluasi dan konsolidasi dilaksanakan menyeluruh, selain tentang Sumber Daya Manusia juga termasuk didalamnya tentang lingkup waralaba dengan OMI terutama yang berkaitan dengan harga beli dan kegiatan promosi. Menghindari kerugian karena barang rusak atau kadaluwarsa, selama triwulan pertama dan kedua, manajemen Mini Market Kalibata mengurangi pembelian barang dagangan untuk persediaan. Sementara pemanfaatan lahan dan ruangan usaha baru difokuskan untuk kegiatan Mini Market yang operasionalisasinya bekerjasama dengan OMI di lantai dasar. Pada tahun 2014 ini, Mini Market Kalibata telah memberikan hanya kontribusi keuntungan terhadap koperasi sebesar Rp. 70.137.038,00. Berkenaan dengan pengembangan usaha dilingkungan Mini Market Kalibata, Koperasi telah mengajukan permohonan izin kepada Bagian Perumahan untuk memanfaatkan lahan di pinggir Mini Market sebagai ruang penjualan makanan siap saji yang pangsa pasarnya adalah para pegawai dilingkungan Perumahan.

f. PERDAGANGAN KREDIT

Perdagangan barang secara kredit merupakan aktivitas usaha kedua selain Unit Simpan Pinjam yang langsung berhubungan dengan anggota, sehingga pertumbuhannya akan sangat dipengaruhi perilaku konsumen (*costumers behavior*) anggota koperasi termasuk daya beli dan klasifikasi kebutuhannya. Namun disisi lain ada beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2014 selain adanya keterlambatan pembayaran pendapatantunjangan pegawai pada semester I, yaitu tingkat jasa yang masih diatas jasa pinjaman reguler serta kecukupan modal pembiayaan penjualan kredit yang sementara ini difokuskan dulu untuk memenuhi pembiayaan pinjaman pada unit simpan pinjam. Disisi lain kami menyadari bahwa hal yang utama berkenaan dengan strategi pengelolaan sub unit perdagangan kredit pelaksanaannya belum optimal khususnya yang berkaitan dengan keempat unsur (4P) dalam marketing yang meliputi *Product, Price, Place, Promotion*.

Peningkatan keragaman penawaran di TOSERBA sebagai tempat display yang berkaitan dengan barang-barang kebutuhan rumahtangga belum maksimal memberikan efek positif terhadap peningkatan keuntungan unit perdagangan kredit yang pada tahun 2014 meskipun mengalami kenaikan yang signifikan dalam prosentase kenaikannya. Unit usaha ini memberikan kontribusi terhadap keuntungan Koperasi sebesar Rp. 120.311.096,00 dengan tingkat partisipasi anggota sebesar 10,56%. Hal menarik dalam pencapaian unit ini, yaitu adanya kenaikan pendapatan sebesar Rp. 42.405.718,00 atau meningkat sebesar 54,4%, namun disisi

lain terjadi penurunan partisipan (anggota yang memanfaatkan layanan penjualan kredit dibandingkan dengan jumlah anggota koperasi) sebanyak 33 orang atau menurun sebesar 2,42% dari partisipasi anggota pada tahun sebelumnya.

g. CAFETARIA WISMA GRIYA SABHA

Kegiatan Usaha Cafeteria Wisma Griya Sabha yang keberadaannya melekat dengan kondisi Wisma DPR RI Griya Sabha, secara ekonomis belum menunjukkan perannya sebagai kontributor pendapatan yang besar terhadap pendapatan koperasi. Namun dapat dimaklumi bahwa pendapatan yang diperoleh unit ini akan sangat tergantung kepada kegiatan yang dilaksanakan serta pengunjung yang menggunakan fasilitas Wisma, baik penginapan maupun hanya untuk penggunaan ruang rapatnya saja. Hal ini tentu menyulitkan koperasi dalam pengembangan pengelolaan terutama untuk aplikasi marketing pada umumnya dilakukan oleh suatu badan usaha. Namun pada tahun 2014, unit ini telah mengalami peningkatan signifikan dalam memberikan kontribusi yaitu sebesar Rp.41.090.097,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 16.468.222,00. Peningkatan pendapatan sampai dengan 66,88% dibandingkan tahun sebelumnya, tak lepas dari meningkatnya kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan Wisma. Kontribusi sebesar itu masih didominasi oleh kontribusi pendapatan yang bersumber fee *catering service* atas penyelenggaraan rapat-rapat dan kegiatan yang dilaksanakan di Wisma Griya Sabha. Untuk peningkatan fungsi dan perannya sedang direncanakan pemanfaatan lahan dan bangunan

yang ada untuk kembali menjual makanan siap saji sekaligus sebagai prasarana pendukung rencana kemitraan pengadaan makan pagi dengan pihak pengelola Wisma. Konsep pengadaan makan pagi (*breakfast*) diharapkan dapat disatukan berupa paket penggunaan rumah di wisma dengan perhitungan jumlah orang yang menginap dikalikan harga satuan paket *breakfast* yang ditawarkan dari koperasi melalui pengelola. Dengan demikian cafetaria yang ada di wisma DPR RI Griya Sabha tidak hanya buka sewaktu-waktu saja, namun akan memberikan layanan tiap hari tanpa membebani beban operasional varian usaha yang sudah ada pada saat ini.

h. FOTO COPY & PERCETAKAN , TRAVEL DAN USAHA LAINNYA

Setelah pada bulan maret 2014, pengelolaan Foto Copy dan Percetakan diambil alih seluruhnya oleh koperasi, maka masih satu kegiatan usaha koperasi yang dikelola melalui kerjasama operasional dengan mitra kerja yaitu travel. Kemitraan tersebut akan berakhir masa perjanjiannya pada bulan Januari 2015, dan mempertimbangkan revitalisasi unit usaha koperasi maka kemitraan ini akan diperpanjang sepanjang mitra kerja dalam hal ini Sapta Tours&Travel menghendaki untuk melakukan perpanjangan kemitraan. Perpanjangan yang akan dilaksanakan, tata cara dan bentuknya mengacu pada program kerja dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk Tahun Anggaran 2015. Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud adalah jangka waktu perjanjian hanya setahun dan koperasi mendapatkan bagi hasil berupa *fixed income* dan *variable income* yang bersumber dari fee penjualan tiket domestik dan luar negeri. Untuk Tahun Buku 2014, unit usaha travel ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 61.636.800,00 meningkat sebesar 9,85% dari tahun sebelumnya.

Unit usaha Foto Copy & Percetakan yang beroperasi efektif selama 3 triwulan dalam tahun buku 2014 memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp.85.784.995,00. Pendapatan unit usaha ini meningkat signifikan dibandingkan dengan pada saat melakukan kemitraan dengan Induk Koperasi Angkutan Darat (INKOPANG). Kepercayaan dan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari anggota pemilik koperasi telah memberikan andil besar dalam meningkatkan produktivitas unit usaha koperasi. Sejak pengambilalihan dipublikasikan, terjadi peningkatan anggota koperasi yang kebetulan diberikan amanah untuk mengelola penggandaan, cetakan buku dan cover atau anggota dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran pada unit kerjanya. Apresiasi kami sampaikan, dengan harapan pemanfaatan terhadap layanan usaha fotocopy dan percetakan kedepan akan semakin meningkat seiring kebutuhan layanan jasa tersebut dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Selain memiliki *captive market*, kedua unit usaha ini dapat terus berkembang mengingat adanya frekwensi kegiatan yang dilakukan mitra kerja DPR dan tamu lainnya dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kedua Unit Usaha ini sangat diperlukan sebagai bagian pemberi kontribusi pendapatan terhadap koperasi, apalagi memperhatikan potensi pasar yang ada dilingkungan DPR/MPR/DPD maupun potensi pasar yang bersifat *walk in costumers*.

Usaha lainnya dalam lingkup sektor riil adalah konsep bisnis yang dipersiapkan koperasi baik yang berbasis pemupukan modal maupun berorientasi pemanfaatn potensi yang ada dilingkungan sendiri. Koperasi sebagai entitas bisnis, tentu dituntut untuk tumbuh berkembang ekspansi dan bersaing dalam sektor riil kedalam maupun keluar lingkungan. Pemanfaatan ruang usaha milik koperasi di Tangcity Mall yang berlokasi lantai dasar LG. D-0059 yang memiliki *future value* yang baik, sesuai dengan laporan persetujuan dalam forum Rapat Anggota khusus Tahun 2014 untuk sementara akan disewakan kepada Asa Musika yang merupakan dealer resmi Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID). Dalam pengembangannya, Koperasi khususnya unit usaha penjualan kredit akan bekerjasama juga dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan anggota terhadap alat-alat musik yamaha terutama *small music instruments* yang sering dipergunakan dan dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Adapun nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp.

20.000.000,00 pada tahun pertama dan akan meningkat pada tahun selanjutnya sesuai dengan mekanisme pasar yang ada.

Kemudian diversifikasi usaha yang pernah disampaikan sebagai upaya untuk menangkap peluang yang timbul dari kebutuhan dan keinginan anggota dalam hal pengadaan perumahan, koperasi telag berkoordinasi dengan KORPRI Unit Setjen DPR RI untuk mencoba menjajagi pembukaan pemukiman bagi anggota yang membutuhkannya. Sedangkan rencana pengadaan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) untuk sementara belum dapat dilaksanakan pada tahun buku 2014 karne mempertimbangkan adanya keterlambatan penerimaan tunjangan anggota yang secara tidak langsung mengganggu *cash flow* koperasi dan anggotanya. Program KPM ini akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 melalui kerjasama dengan lembaga perbankan untuk pembiayaannya dan beberapa dealer otomotif untuk pengadaan barangnya. Harapan program ini akan mengangkat dan meningkatkan produktivitas unit usaha sektor riil dan memberikan manfaat kepada anggota yang membutuhkannya.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, praktikan dituntut untuk melatih ketelitian, keterampilan, kedisiplinan, dan bertanggung jawab pada tugas yang diberikan kepada praktikan.

Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, praktikan diberikan tugas di beberapa unit usaha Koperasi Setjen DPR RI. Berikut adalah tugas yang diberikan kepada praktikan:

1. Toko Serba Ada (TOSERBA)

Dalam bidang kerja di toko serba ada, praktikan mendapatkan tugas untuk menjadi kasir. Pelaksanaan kerja di TOSERBA dilakukan selama 2 minggu terhitung mulai tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 16 Januari 2015.

2. Pujasera

Dalam bidang kerja di pujasera pun, praktikan ditempatkan kembali untuk menjadi kasir dalam menerima pembayaran pelanggan dalam membeli makanan. Tugas menjadi kasir di pujasera dilaksanakan selama 1 minggu, terhitung dari tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 23 Januari 2015.

3. Unit Simpan Pinjam

Pada bagian unit simpan pinjam, praktikan diberikan tugas sebagai staff bagian peminjaman. Pada bagian ini, praktikan ditugaskan selama 1 minggu, terhitung mulai tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2015. Tugas-tugas praktikan selama menjadi staff bagian peminjaman ialah:

- Menginput data nasabah yang akan melakukan pinjaman
- Menghitung gaji nasabah untuk mengetahui apakah layak atau tidak diberikan pinjaman
- Membantu proses pencairan dana bagi nasabah

B. Pelaksanaan Kerja

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di Koperasi Setjen DPR RI yang dimulai pada tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2015, praktikan dibantu oleh manager unit usaha riil yaitu Bpk. Cucu Wahyu Zakaria untuk dapat memahami pelaksanaan kerja di unit – unit usaha koperasi. Beliau memberikan bimbingan dan arahan kemana praktikan harus memulai praktik kerja lapangan.

Tahapan awal sebelum memulai kegiatan praktek kerja lapangan, Bapak Cucu mengenalkan beberapa unit usaha yang ada di dalam Koperasi Setjen DPR RI serta unit usaha mana yang cocok dijadikan tempat kegiatan praktek kerja lapangan berlangsung yaitu:

1. Toko Serba Ada (TOSERBA)

Pada unit usaha ini, koperasi menjual berbagai barang dengan harga yang terjangkau dimana koperasi hanya mengambil untung dibawah 20% pada setiap barang yang dijual. Barang-barang yang dijual di TOSERBA berupa makanan ringan, minuman, pakaian, alat tulis kantor, kebutuhan rumah tangga seperti sabun mandi, sabun cuci muka, pasta gigi, dll. TOSERBA juga menyediakan kredit berupa kredit ringan untuk pembelian elektronik dengan mengambil untung sekitar 12% pada setiap barang yang akan di kreditkan kepada anggota koperasi.

Tugas yang diberikan kepada praktikan di TOSERBA adalah menjadi kasir, dimana melayani pelanggan yang akan membayar setiap barang yang akan dibeli.

2. Pujasera

Pujasera merupakan suatu kegiatan usaha dalam pelayanan tata boga kepada Anggota dan non Anggota yang bekerjasama dengan para pedagang sebagai mitra binaan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang pada tahun 2013 meliputi 17 (tujuh belas) counter dan 4 (empat) non counter. Dalam perjalanannya setelah lima tahun melayani anggota dan pengguna jasa lainnya serta sesuai tahapan pengembangannya sejak dibuka pada tanggal 29 tahun 2003, pada tahun 2008 Pujasera secara administratif telah menyatu dengan kegiatan Koperasi secara keseluruhan. Pada unit usaha ini, praktikan diberikan tugas untuk

menjadi kasir di pujasera yang melayani pelanggan ketika akan membayar makanan yang akan dibeli oleh pelanggan.

3. Unit Simpan Pinjam

Sampai saat ini Unit Simpan Pinjam masih merupakan *core bussines* Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Oleh karena itu konsentrasi pengelolaan pengurus lebih pada Unit Usaha ini. Hal ini dilakukan mengingat disamping sebagai Unit Usaha yang memberikan kontribusi pendapatan yang tinggi terhadap pendapatan koperasi, kondisi kompetisi tajam dengan lembaga keuangan dan memiliki kandungan resiko yang tinggi (*high risk*) dan menjadi indikator utama kualitas layanan koperasi terhadap anggotanya.

Praktikan diberikan tugas sebagai staff bagian peminjaman dimana hal-hal yang dilakukan oleh praktikan adalah:

- Menginput data nasabah yang akan melakukan pinjaman

Pada saat nasabah untuk melakukan peminjaman, nasabah akan diberikan formulir yang disediakan oleh koperasi, yang berisikan data nasabah, jumlah pinjaman yang akan diajukan, dan keperluan peminjaman. Semua data di dalam formulir ini harus diisi secara lengkap karena dibutuhkan untuk data koperasi.

- Menghitung gaji nasabah untuk mengetahui apakah layak atau tidak diberikan pinjaman

Setelah menginput data nasabah selesai dilakukan, praktikan akan mengecek gaji nasabah. Data gaji nasabah ini telah tersedia di *database* komputer, dimana untuk penyediaan data gaji nasabah ini koperasi bekerja sama dengan bagian keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Di dalam data gaji ini, telah tersedia gaji, tunjangan kinerja, pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan oleh nasabah serta pelunasan. Jika memang ada pinjaman lain yang belum lunas dan gaji yang telah dihitung oleh praktikan tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran pinjaman yang baru diajukan, maka praktikan akan menghubungi nasabah untuk memberikan solusi apakah pinjaman yang belum lunas tersebut akan dilunasi karena jika belum lunas, maka koperasi tidak akan memberikan persetujuan untuk pinjaman baru yang akan diajukan. Dalam penghitungan layak atau tidaknya diberikan pinjaman, Bpk. Cucu memberikan arahan hanya untuk menghitung dari 70% gaji dan tunjangan kerjanya. Dan dalam pemberian pinjaman, terdapat 3 pilihan kategori peminjaman. Berikut adalah kategori peminjamannya:

a) Pinjaman Reguler

Jenis pinjaman yang disediakan Unit Simpan

Pinjam untuk anggota dan anggota luar biasa

koperasi yang pembiayaannya bersumber dari modal sendiri. Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka pendek dengan jasa yang rendah yaitu sebesar 0.8% setiap bulannya.

b) Pinjaman Reguler Plus

Jenis pinjaman produk baru pada tahun 2013 untuk anggota dan anggota luar biasa koperasi yang merupakan pinjaman jangka menengah dengan maksimal tenor 60 bulan dan jasa setiap bulannya sebesar 1%.

c) Pinjaman Insidentil (Multiguna)

Jenis pinjaman tanpa agunan dengan nilai plafond maksimal sebesar Rp. 150.000.000,- dan tenor maksimal 96 bulan.

Dalam kategori peminjaman ini, jika anggota sudah pernah meminjam pada Pinjaman Reguler dan ingin meminjam kembali maka koperasi akan memberikan pinjaman dalam bentuk Pinjaman Reguler Plus begitu pula seterusnya jika ingin meminjam kembali maka koperasi akan memberikan kategori Pinjaman Insidentil. Apabila dana tersebut telah disetujui untuk dicairkan, maka koperasi akan memotong dana tersebut terlebih dahulu untuk biaya-biaya sebagai berikut:

- a) Biaya provisi 1% dari pinjaman
- b) Notaris 0.5% dari pinjaman
- c) Tabungan khusus 1% dari pinjaman
- d) Asuransi ini besarnya biaya pemotongan tergantung dari tenor pinjaman yang diambil oleh anggota.

➤ Membantu proses pencairan dana bagi nasabah

Jika syarat-syarat dalam peminjaman sudah disetujui oleh manager Unit Simpan Pinjam, Bendahara, dan Ketua/Wakil Ketua maka praktikan akan menghubungi anggota tersebut untuk memberitahu bahwa dana sudah cair dan sudah bisa diambil.

C. Kendala Yang Dihadapi

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, praktikan mengalami kendala-kendala. Berikut adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan:

1. Ketelitian dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Hal ini dibutuhkan ketika praktikan menjadi kasir ketika di TOSERBA dan Pujasera, karena ketika menjadi kasir praktikan harus teliti dalam menghitung uang. Begitu pula ketika praktikan menjadi staff peminjaman, dikarenakan terdapat hitungan untuk potongan-potongan peminjaman.

2. Kesulitan yang dihadapi oleh praktikan dikarenakan meja yang tersedia di ruangan koperasi simpan pinjam hanya cukup menampung pegawai tetapi koperasi sehingga terkadang praktikan bergantian meja dengan pegawai tetap koperasi atau melaksanakan perhitungan peminjaman di ruang rapat atau di dapur koperasi.
3. Kesulitan dalam memahami software yang terdapat di koperasi simpan pinjam, dikarenakan praktikan tidak melakukan pelatihan terlebih dahulu untuk menjalankan software tersebut sehingga praktikan terkadang terkendala dengan software tersebut.

D. Cara Mengatasi Kendala

Dalam mengatasi kendala, praktikan selalu berusaha melakukan yang terbaik agar hasil yang didapatkan memuaskan bagi praktikan maupun pihak koperasi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Usaha – usaha yang dilakukan praktikan untuk mengatasi kendala antara lain :

1. Ketelitian dalam melakukan pekerjaan

Masalah yang dihadapi praktikan ialah dikarenakan berhadapan langsung dengan pelanggan dimana berkaitan langsung dengan keuangan untuk penghitungan jumlah uang tersebut. Dan upaya yang dilakukan dari masalah tersebut adalah dituntut kinerja praktikan yang baik untuk menjaga keakuratan dan ketepatan data secara teliti dan cermat mengolah data yang ada. Sehingga tidak ada kesalahan pada proses pembayaran oleh pelanggan. Seperti yang di kemukakan oleh

Anwar Prabu Mangkunegara: Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya¹.

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja seseorang yang dicapai sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini ketelitian dan keakuratan data menjadi beban dan tanggung jawab praktikan selama melaksanakan praktik lapangan kerja di Koperasi Pegawai Setjen DPR RI. Oleh karena itu, dalam hal ini kinerja praktikan dapat dilihat dengan ketelitian praktikan dalam menghitung uang kembalian kepada para konsumen.

2. Kesulitan menggunakan fasilitas kantor

Bentuk kesulitan tersebut adalah meja yang hanya cukup untuk menampung pegawai koperasinya saja, sehingga menyebabkan seringnya praktikan bergantian dengan pegawai atau melakukan perhitungan di dapur koperasi. Hal ini menyebabkan tertundanya praktikan dalam menyelesaikan tugas.

Menurut Suad Husnan “Fasilitas kerja merupakan suatu bentuk pelayanan perusahaan terhadap karyawan agar menunjang kinerja dalam memenuhi kebutuhan karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan”. Adanya fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan sangat mendukung karyawan dalam bekerja. Fasilitas kerja tersebut sebagai alat atau sarana dan prasarana untuk membantu

¹ <http://www.elib.unikom.ac.id/teori-kinerja.html/> diakses pada tanggal 8 Februari 2015 18.45 WIB

karyawan agar lebih mudah menyelesaikan pekerjaannya dan karyawan akan bekerja lebih produktif, menurut jurnal karyawan akan merasa nyaman dalam bekerja dan menimbulkan semangat kerja untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan².

Selain itu menurut Flippo dia berpendapat mengenai kualitas kerja yaitu : “meskipun setiap organisasi berbeda pandangan tentang standar dari kualitas kerja pegawai, tetapi pada intinya efektifitas dan efisiensi menjadi ukuran yang umum³.

Bertitik tolak pada pendapat Flippo tersebut maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa inti dari kualitas kerja adalah sesuatu yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.

Dengan adanya fasilitas yang memadai akan menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja yang dilakukan sumber daya manusia tersebut. Dengan mengetahui hal tersebut dan kemungkinan kecil fasilitas pendukung tersebut dapat segera dilengkapi mengingat praktikan bukan orang yang berwenang untuk mengajukan hal tersebut, maka praktikan mengatasi hal tersebut dengan duduk di meja tamu agar dapat tugas dapat diselesaikan tepat waktu.

² Budiyono. 2008. Pengaruh Disiplin Kerja Dan Fasilitas Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Karya Gemilang Surakarta. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

³ Edwin B Flippo. 1995. Manajemen Personalialia, Edisi IV, PT. Erlangga: Jakarta.

3. Kesulitan dalam menggunakan *software* koperasi

Dalam menghadapi kendala praktikan untuk dapat menggunakan aplikasi (*software*) yang digunakan Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI ialah dengan melakukan pembelajaran dan pelatihan. Menurut Ivancevich “pembelajaran merupakan suatu kegiatan dimana seorang individu memperoleh keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang akan mendatangkan perubahan yang relatif permanen⁴. Sedangkan, pelatihan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan⁵.

Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah.”⁶ Oleh karena itu untuk mengubah keadaan dari yang sebelumnya yaitu belum dapat menggunakan aplikasi dengan baik sampai bisa menggunakan aplikasi dengan baik dibutuhkan pembelajaran dan pelatihan. Walaupun tidak diberikan pelatihan dan pembelajaran oleh koperasi secara resmi, praktikan selalu berusaha dengan belajar sendiri dan membiasakan diri untuk menggunakan aplikasi tersebut.

“Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari

⁴ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 110

⁵ *Ibid.* hlm. 110

⁶ Tanpa nama, “teori belajar”<http://bpi.umm.ac.id/home.php?c=1710-4>, diakses pada tanggal 20 Maret 2015

pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek.”⁷

Pembelajaran tidak hanya didapat dengan proses belajar mengajar dilingkungan formal maupun nonformal, Oleh karena itu walaupun pekerjaan yang diberikan belum di dapat dibangku perkuliahan yaitu dalam menggunakan aplikasi khusus simpan pinjam praktikan akan terus belajar melalui pengalaman yaitu belajar melalui hal-hal yang baru di tempat praktikan PKL yaitu Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI.

⁷Daft Richard L. “*Pengalaman belajar*” .Edisi ke 9. Terjemahan Tita Maria Kanita. Jakarta, Salemba, 2010

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah praktikan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Koperasi Pegawai Setjen DPR RI adapun pembelajaran yang praktikan dapat adalah banyak pengetahuan mengenai koperasi yang praktikan dapat di bangku kuliah untuk di terapkan ketika Praktek Kerja Lapangan, pengetahuan inilah yang membantu praktikan agar mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu, Praktek Kerja Lapangan membantu praktikan agar dapat mengenal dunia kerja lebih awal.

Berdasarkan uraian Laporan Praktek Kerja Lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Banyak teori yang telah diajarkan saat di perkuliahan ternyata banyak yang diterapkan pada saat Praktek Kerja Lapangan terutama teori – teori mengenai koperasi serta tata kelolanya.
2. Dikarenakan salah satu bidang kerja praktikan adalah menjadi staff unit simpan pinjam, maka diperlukan keahlian dalam mengaplikasikan komputer dengan baik, tetapi dikarenakan kurangnya fasilitas kantor maka praktikan terkadang harus mengerjakannya di dapur atau di ruang rapat

koperasi dan hal ini merupakan salah satu kendala praktikan dalam mengerjakan tugas yang diberikan.

3. Ketika praktikan menghadapi kendala dalam melaksanakan tugas yang diberikan maka praktikan harus bertanya kepada karyawan yang lain agar praktikan dapat mengerti serta menyelesaikan tugas dengan hasil yang optimal dan tepat waktu.
4. Setelah praktikan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan maka praktikan lebih memahami bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran untuk menyelesaikan pekerjaan dan komunikasi yang baik dengan karyawan lain.
5. Disiplin adalah hal yang diperlukan di dalam dunia kerja agar dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dan terutama adalah telat adalah hal yang tidak ditoleransi di dalam dunia kerja.

B. Saran

Berdasarkan Praktek Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan oleh praktikan, adapun saran yang dapat praktikan sampaikan :

1. Koperasi Pegawai Setjen DPR RI:
 - a. Salah satu bidang kerja praktikan adalah menjadi kasir di Toserba Koperasi, dan praktikan melihat bahwa tata letak di dalam Toserba Koperasi ini sangat terbatas sekali yang menjadikan konsumen terkadang tidak melihat produk yang diinginkan jika tidak ditunjukkan oleh staff toserba. Oleh

karena itu, praktikan menyarankan agar Koperasi dapat mengatur tata letak yang baik untuk penempatan produk serta menempatkan produk – produk yang laris dibeli oleh konsumen di tempat yang strategis.

- b. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, koperasi seharusnya memberikan pelatihan sebelumnya untuk menjalankan software yang digunakan oleh koperasi dalam menjalankan sistemnya.

2. Praktikan dan mahasiswa:

- a. Mencari tempat PKL sebaiknya pengajuan ke tempat yang dituju dilakukan 1-2 bulan sebelum pelaksanaan PKL.
- b. Mengajukan ke beberapa tempat yang berbeda jika tempat yang dituju itdak menerima.
- c. Menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di tempat PKL dan menjaga nama baik universitas.
- d. Mahasiswa hendaknya lebih mempersiapkan diri baik dari segi mental maupun kemampuan dan keterampilan sebelum melakukan PKL.
- e. Cepat tanggap dalam lingkungan baru

3. Universitas:

- a. Sebaiknya pihak universitas khususnya pihak fakultas melakukan sosialisasi yang lebih aktif mengenai Praktik Kerja Lapangan kepada mahasiswa.

- b. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang sesuai antara jurusan dengan bidang kerja mahasiswa sehingga mahasiswa dapat dengan mudah dan siap terjun dalam dunia kerja.
- c. Hendaknya fakultas tetap menjaga hubungan kerjasama dengan perusahaan atau instansi pemerintah untuk dapat menempatkan mahasiswanya dalam melaksanakan PKL sehingga mahasiswa tidak kesulitan dalam mencari tempat PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budiyono. 2008. *Pengaruh Disiplin Kerja Dan Fasilitas Kerja Terhadap Produktivitas Kerja*

Edwin B Flippo. 1995. *Manajemen Personalia Edisi IV*. PT. Erlangga: Jakarta.

Karyawan Pada PT. Karya Gemilang Surakarta. Surakarta: Fakultas Ekonomi

Mankumanegara, Anwar Prabu., 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung:

PT. Remaja Rosdakarya

Sibarani, Mutiara. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta: Ghalia Indonesia

Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Internet:

<http://bpi.umm.ac.id/home.php?c=1710-4>,

(diakses pada tanggal 20 Maret 2015)

Lampiran II



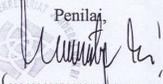
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
 Ged R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
 Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
 www.unj.ac.id/fe

PENILAIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2 SKS

NamaPraktikan : Annisa Mahardhika Putri
 NomorRegistrasi : 8105128000
 Program Studi/Jurusan : Pendidikan Ekonomi/Ekonomi dan Administrasi
 TempatPraktik : Koperasi Setjen DPR RI

NO.	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 50 – 100	KETERANGAN				
1	Kehadiran	90	Keterangan Penilaian: Skor Nilai Predikat 80 – 100 A Sangat Baik 70 – 79 B Baik 60 – 69 C Cukup 55 – 59 D Kurang Nilai rata – rata : $\frac{855}{10 \text{ (sepuluh)}} = 85.5$				
2	Kedisiplinan	90					
3	Sikap dan Kepribadian	85					
4	Kemampuan Dasar	80					
5	Keterampilan Menggunakan Fasilitas	90					
6	Kemampuan Membaca Situasi Dan Menggunakan Fasilitas	80					
7	Partisipasi Dan Hubungan Antar Karyawan	90					
8	Aktivitas Dan Kreativitas	80					
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	80					
10	Hasil Pekerjaan	90					
JUMLAH		855	<table border="1"> <tr> <td>85.5</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Angka Bulat</td> <td>Angka Huruf</td> </tr> </table> Nilai Akhir :	85.5	A	Angka Bulat	Angka Huruf
85.5	A						
Angka Bulat	Angka Huruf						

Jakarta, 2 Februari 2015

Penilai

 (.....)

Lampiran III



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
 Ged R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
 Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
 www.unj.ac.id/fe

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama : AnnisaMahardhikaPutri
 No. Registrasi : 8105128000
 Program Studi : PendidikanEkonomi
 NamaInstansi : KoperasiSetjen DPR RI

No.	Hari/Tanggal	Paraf	Keterangan	Waktu
1	Senin, 5 Januari 2015	1. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.00
2	Selasa, 6 Januari 2015	2. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.00
3	Rabu, 7 Januari 2015	3. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.00
4	Kamis, 8 Januari 2015	4. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.00
5	Jumat, 9 Januari 2015	5. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.30
6	Senin, 12 Januari 2015	6. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.00
7	Selasa, 13 Januari 2015	7. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.00
8	Rabu, 14 Januari 2015	8. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.00
9	Kamis, 15 Januari 2015	9. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.00
10	Jumat, 16 Januari 2015	10. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.30
11	Senin, 19 Januari 2015	11. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.00
12	Selasa, 20 Januari 2015	12. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.00
13	Rabu, 21 Januari 2015	13. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.00
14	Kamis, 22 Januari 2015	14. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.00
15	Jumat, 23 Januari 2015	15. <i>[Signature]</i>	Kasir	08.00 - 16.30



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI**

Ged R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
www.unj.ac.id/fe

16	Senin, 26 Januari 2015		16. <i>[Signature]</i>	Staff USP	08.00 - 16.00
17	Selasa, 27 Januari 2015	17. <i>[Signature]</i>		Staff USP	08.00 - 16.00
18	Rabu, 28 Januari 2015		18. <i>[Signature]</i>	Staff USP	08.00 - 16.00
19	Kamis, 29 Januari 2015	19. <i>[Signature]</i>		Staff USP	08.00 - 16.00
20	Jumat, 30 Januari 2015		20. <i>[Signature]</i>	Staff USP	08.00 - 16.30

Jakarta, 2 Februari 2015

Penilai,

[Signature]
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
(*[Signature]*)

Lampiran IV



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I: 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
 BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
 Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486
 Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 4527/UN39.12/KM/2014
 Lamp. : 1 lembar
 Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

1 Oktober 2014

Yth. Pimpinan Koperasi Setjen DPR RI

Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Jurusan	: Ekonomi dan Administrasi
Fakultas	: Ekonomi
Sebanyak	: 2 Orang (M. Irwan Fauzi, dkk) Daftar Nama Terlampir.
Untuk Mengadakan	: Praktek Kerja Lapangan
Dalam Rangka	: Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan
No. Telp/HP	: 081908321134

Di : **Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
 Akademik dan Kemahasiswaan,



[Signature]
 Drs. Syaifullah
 NIP 195702161984031001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog / Jurusan Ekonomi dan Administrasi

Lampiran V



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285

www.unj.ac.id/fe

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL

1. Nama Mahasiswa : Annisa Mahardhika Putri
2. No.Registrasi : 810522000
3. Program Studi : Pendidikan Ekonomi
4. Dosen Pembimbing : Bapak I. Ketor P. Sudartha
NIP. 19560207.198602.1.001
5. Judul PKL : Laporan Praktik Kerja Lapangan
pada Koperasi Pegawai Sekretariat
Jenderal DPR RI

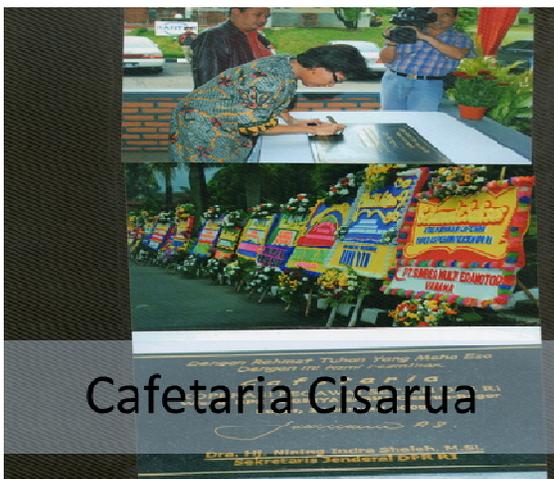
NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	12 / 05 / 15	Bab I + Bab II	Penulisan sesuai pedoman	
2	13 / 05 / 15	Bab III + Bab IV	Persetujuan Sidang PKL	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

SETUJU UNTUK UJIAN PKL

Catatan :

- Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi
- Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

Dokumentasi Koperasi Pegawai Sekretariat Jendral DPR RI



LAMPIRAN I



LAMPIRAN I



Unit Simpan
Pinjam



Unit Simpan
Pinjam



Sekretariat
Jenderal DPR RI



Toserba



Unit Simpan
Pinjam



Pujasera



Toserba

**STRATEGI PEMASARAN PADA SUB UNIT USAHA RIIL TOSERBA DAN
PUJASERA KOPERASI PEGAWAI SEKRETRIAT JENDERAL DPR RI TAHUN
2014-2015**

Annisa Mahardhika Putri*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang strategi pemasaran sub unit usaha riil Toserba dan Pujasera Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI pada unit usaha riil yang merupakan salah salah sub unit yang memberikan kontribusi pendapatan paling banyak selain unit simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan data kualitatif secara empiris dengan melakukan wawancara dan mengamati data untuk mengetahui strategi pemasaran koperasi tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemasaran yang baik akan mempengaruhi konsumen untuk membeli barang di sub unit usaha tersebut dan tentu saja hal ini akan berpengaruh pula terhadap meningkatnya pendapatan koperasi dari kedua sub unit usaha riil tersebut.

Kata Kunci: Koperasi, Pemasaran, Strategi Pemasaran.

* Annisa Mahardhika Putri. Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Pendidikan Ekonomi Koperasi Non Reguler 2012, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220

A. Pendahuluan

Koperasi merupakan badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan dan terbuka yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

Dalam perkembangannya banyak koperasi di Indonesia yang belum melaksanakan asas terbuka ini dikarenakan hanya berupa koperasi pegawai instansi saja. Selain asas terbuka yang belum terlaksana, koperasi di Indonesia juga mengalami masalah dalam hal tata kelola hal ini dikarenakan tata kelola koperasi umumnya masih sangat buruk.

Tata kelola koperasi meliputi kepemilikan, kepengurusan, modal sosial, pemberian insentif, kontrak hukum, kontrol administratif, dan pemilihan partner usaha serta kekuatan

koperasi itu sendiri. Banyak sekali masalah-masalah koperasi yang disebabkan oleh tata kelola koperasi yang buruk, hal ini terbukti banyak koperasi yang hilang dengan sendirinya, bahkan tidak jarang koperasi yang sudah berdiri lama namun tidak berkembang.

Masalah koperasi yang lain adalah masalah pemasaran, terutama jika koperasi tersebut merupakan koperasi serba usaha. Banyak yang menilai bahwa strategi pemasaran di dalam koperasi sangatlah kurang, padahal koperasi sudah mempunyai pasarnya tersendiri yaitu anggota dari koperasi tersebut. Berikut adalah permasalahan dalam strategi pemasaran Koperasi Pegawai Setjen DPR RI:

1. Harga yang lebih mahal dibandingkan dengan toserba pesaingnya. Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu tolong menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*)¹.
2. Promosi yang hanya berdasarkan dari “mulut ke mulut” saja, yang dirasa sangat kurang dikarenakan di Toserba Koperasi Pegawai Setjen juga menawarkan kredit elektronik yang bisa menjadikan keuntungan lebih bagi pendapatan. Menurut ICA Koperasi adalah kumpulan orang – orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip – prinsip koperasi².
3. Produk yang kurang bervariasi di dalam Toserba Koperasi Pegawai Setjen DPR RI
4. Lokasi yang kurang strategis dibandingkan dengan pesaingnya yaitu Toserba Koperasi Setjen MPR RI.

B. Teori

1. Koperasi

¹ Sitio, arifin dan Halomoan Tamba, Koperasi : Teori dan Praktik (Jakarta : Erlangga, 2001), hlm.13

²Harsoyo, Y., dkk, Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 48

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Indonesia, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan pada prinsip-prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan³.

2. Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh penguasa dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk perkembangan dan mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung pada keahlian mereka dibidang pemasaran, penjualan, produksi, keuangan, maupun bidang lainnya.

Adapun pengertian pemasaran menurut William J. Stanton yang

dikutip oleh Basu Swasta adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial⁴.

Dari pengertian di atas, bahwasanya pemasaran merupakan usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana strategi yang diarahkan pada usaha pemasaran kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba.

3. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran menurut Phillip Kotler adalah suatu pendekatan pokok yang akan

³ Ibid.

⁴Basu Swasta, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty,1999), hal 5

digunakan oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu yang mana didalamnya tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran dan tingkat biaya pemasaran yang di perlukan⁵.

Strategi pemasaran menurut Marwan Asri adalah wujud rencana yang terarah di bidang pemasaran, untuk memperoleh suatu hasil yang optimal, yang dalam hal ini mengandung dua faktor yaitu: target market yang merupakan suatu kelompok konsumen yang homogen, yang menjadi sasaran perusahaan. Dan marketing mix yaitu variabel-variabel pemasaran yang dapat dikontrol yang akan dikombinasikan oleh perusahaan

untuk memperoleh hasil yang maksimal⁶.

Dari definisi di atas strategi pemasaran merupakan perpaduan dari beberapa variable-variabel pemasaran yang direncanakan oleh suatu perusahaan. Variable-variabel tersebut antara lain:

a. Bauran pemasaran yang terdiri dari

Menurut Phillip Kotler bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran.

Definisi lain tentang marketing mix yang dikemukakan oleh Richar T. adalah kombinasi dari kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk memasarkan barang dan jasa tertentu selama periode

⁵ Phillip Kotler, *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan dan Pengendalian*, (Jakarta: erlangga 1989), hal 401.

⁶ Marwan Asri, *Marketing*, hal 30

waktu tertentu pada pasar tertentu⁷.

Strategi bauran pemasaran merupakan salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu, yang juga merupakan kombinasi variable atau kegiatan yang menjadi inti dari sistem pemasaran, variabel mana yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para konsumen. Variabel tersebut terdiri dari *place, product, promotion, price*

b. Pasar sasaran

Targeting merupakan strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. Karena sumber daya yang memiliki terbatas. Dengan menentukan target yang akan dituju, usaha kita akan lebih terarah, mendidik target pasar

harus benar-benar pokok sehingga upaya yang dikeluarkan efektif dan efisien.

Untuk itu perusahaan perlu mendidik pasar yang akan dimasuki yang tentunya harus sesuai dengan keunggulan daya saing yang dimiliki oleh perusahaan.

c. Segmentansi pasar

segmentasi pasar tersebut menurut Fandy Tjiptono segmentasi pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen, dimana masing-masing segmennya cenderung bersifat homogen dalam aspek⁸.

Jadi, segmen pasar merupakan penetapan oleh perusahaan secara jelas kelompok-

⁷ Basu Swasta, 1987 hal 6

⁸ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Jasa*, Ed, 11, (yogyakarta: Andi 1997), hal 69

kelompok pasar yang sesuai untuk dilayani, selain efektif dan efisien melalui kombinasi kebijakan marketing mix yang berbeda-beda antara segmen yang satu dengan segmen yang lain.

d. *Positioning*

Strategi selanjutnya yang harus dirumuskan adalah bagaimana membuat positioning yang tepat bagi perusahaan dan produk-produk yang dihasilkan.

Menurut Hermawan Kartajaya dan Muh. Syukir Sula positioning itu sendiri strategi untuk merebut posisi dibenak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan.

Jadi, positioning adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana identitas perusahaan

tertanam dibenak konsumen yang mempunyai kesesuaian dengan kompetensi yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dan pengajuan dari konsumen⁹.

C. Metodologi Penelitian

a) Studi Area

Penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

b) Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada pengelola koperasi dan melihat data atau laporan pengurus Rapat Anggota Tahunan serta observasi langsung yang diselenggarakan untuk mengumpulkan informasi. Data tersebut akan dianalisis dengan metode kualitatif.

⁹ Hermawan Kartajaya dan Muh. Syukir Sula, Syari'ah *Marketing*, Cet, III, (Bandung: Mizan, 2006), hal 174

c) **RuangLingkup penelitian**

Penelitian ini terbatas pada Unit Usaha Riil Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta Pusat dengan mengamati masalah strategi pemasaran yang mempengaruhi pendapatan usaha riil koperasi.

d) **Metode analisis data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang secara deskriptif akan dijabarkan masalah strategi pemasaran pada unit usaha riil yang terbatas pada Toserba dan Pujasera Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta Pusat.

– 30 Januari 2015 yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penulis dapat mengambar atau mendeskripsikan hasil penelitian mengenai Strategi Pemasaran Toserba dan Pujasera Koperasi Pegawai Setjen DPR RI.

Setelah melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumentasi, maka data diperoleh peneliti pada Koperasi Pegawai Setjen DPR RI adalah sebagai berikut :

Strategi yang digunakan oleh Toserba dan Pujasera Koperasi Setjen DPR RI yang kaitannya dengan pemasaran produk adalah strategi *marketing mix (for"p")*, yaitu strategi *Product* (produk), strategi *price* (harga), strategi *plece* (tempat), strategi *promotion* (promosi), dan strategi Segmentasi pasar, *Targetting*

D. Pembahasan dan Hasil

Dalam penyajian data ini, penulis akan menyajikan hasil atau mendeskripsikan hasil penelitian di Koperasi Pegawai Setjen DPR RI yang dilaksanakan mulai 5 Januari

(pasar sasaran), dan *positioning*, (penetapan produk).

Toserba dan Pujasera Koperasi Setjen DPR RI ini menggunakan strategi marketing mix (bauran pemasaran), segmentasi pasar (*segmentation*), sasaran pasar (*tergetting*), dan penetapan produk (*positioning*) dikarenakan dalam aplikasi pemasaran akan lebih terarah dan berkualitas, selain itu dapat membantu dalam menjalankan pemasaran yang akan dilaksanakan sehingga dapat menghasilkan segmen pasar yang lebih banyak, sasaran pasar yang tepat dan menetapkan produk yang dapat berkesan dan dapat di ingat oleh konsumen.

Lebih jelasnya tentang strategi pemasaran Toserba dan Pujasera Koperasi Setjen DPR RI ini menyajikan datanya yang lebih luas penjabarannya di bawah ini:

Marketing mix merupakan bagian penting dari suatu perusahaan dalam memasarkan produknya. Percuma jika perusahaan banyak produk yang bagus akan tetapi produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan konsumen dan pelanggan, dalam penentuan harga tidak ada diskon, lokasinya sulit dijangkau, serta promosi yang kurang *ofensiff* (giat) dalam menginformasikan produknya.

Dengan semakin banyaknya alternatif bagi Toserba Koperasi Setjen DPR RI untuk memasarkan produknya, maka Toserba dan Pujasera Koperasi Setjen DPR RI harus pandai-pandai memilih strategi pemasaran yang paling sesuai dan terarah dalam menjalankan pemasaran yang akan dilaksanakan agar dapat menghasilkan segmen pasar yang lebih banyak.

Variabel-variabel marketing mix tersebut di antaranya yaitu:

a. Strategi Produk

Untuk memenuhi permintaan konsumen dan pelanggan yang semakin tahun kebutuhannya bermacam-macam, maka Toserba Koperasi Setjen DPR RI selalu membuat inovasi-inovasi terhadap produknya. Karena produk Toserba Koperasi Setjen DPR RI (makanan ringan, minuman, pakaian berupa kemeja kantor dan baju batik, alat tulis kantor, kebutuhan rumah tangga seperti sabun mandi, sabun cuci muka, pasta gigi, dan fasilitas untuk kredit elektronik) mempunyai kualitas, sifat-sifat, dan pilihan produk yang macam-macam, begitupun dengan maka menurut bapak Cucu Zakaria selaku manager sektor riil

Koperasi Setjen DPR RI juga memperluas jaringan pasar serta memperkuat mitra usaha ” itulah kunci sukses perusahaan dalam mengembangkan dan memperluas jaringannya kepada mitra usaha jelasnya¹⁰.

Strategi produk ini sangat vital karena apabila produk yang dihasilkan tidak dikehendaki oleh pasar maka perusahaan akan rugi karena tidak ada pemasaran dan harus menanggung biaya produksi dan gaji karyawan serta biaya-biaya oprasional lainnya.

Akan tetapi apabila produk yang dihasilkan perusahaan tersebut merupakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen, maka produk akan laku di pasaran dan produksi ditingkatkan. Untuk itu perusahaan perlu melakukan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Cucu Wahyu Zakaria, selaku Manager Sektor Riil Koperasi Setjen DPR RI

riset pemasaran, produk apa yang lagi diutuhkan dan disenangi konsumen saat ini.

Dalam hal ini Toserba Koperasi Setjen DPR RI memiliki pesaing dalam hal produk yaitu Toserba Koperasi Setjen MPR RI, hal ini merupakan masalah dikarenakan setelah penulis melakukan survey produk yang ditawarkan di toserba MPR lebih bervariasi. Hal ini diungkapkan pula oleh Bapak Cucu, selaku Manager Sektor Riil bahwa toserba MPR lebih menawarkan produk yang bervariasi meskipun hal ini tidak berpengaruh dalam SHU Koperasi Pegawai Setjen DPR RI yang selalu meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi seharusnya Toserba Koperasi Setjen DPR RI melihat ini

sebagai sebuah kelemahan yang harus segera dibenahi.

b. Strategi Harga

Penetapan harga di Toserba Koperasi Setjen DPR RI diputuskan ketika RAT yaitu untuk Toserba mengambil keuntungan dibawah 20% dari setiap produk yang dijual dan Toserba menawarkan kredit untuk elektronik dengan bunga sebesar 1.2% kemudian untuk Pujasera koperasi hanya menyediakan tempat dan etalase yang kemudian para pedagang dari luar akan mengisi tempat tersebut untuk berjualan produk makanannya, penetapan harga untuk Pujasera ini termasuk mahal untuk lingkungan Pujasera¹¹, dikarenakan berdasarkan survey yang telah penulis

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Cucu Wahyu Zakaria, selaku Manager Sektor Riil Koperasi Setjen DPR RI

lakukan harga makanan termurah di Pujasera ini adalah Rp. 15.000,- untuk siomay 1 porsi kecil dan koperasi akan mengambil keuntungan 10% dari setiap harga makanan yang dijual serta biaya sewa tempat sebesar Rp.500.000,- setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, koperasi tidak menetapkan batas harga atas dan harga bawah yang menyebabkan harga untuk setiap makanan yang dijual di koperasi ini mahal, hal ini tentunya mempengaruhi kemampuan bersaing pujasera dan toserba dikarenakan pesaing di gedung MPR/DPR menawarkan harga yang lebih murah baik di toserba MPR maupun pesaing pujasera yaitu kantin Setjen DPR RI.

Dalam pemenuhan kebutuhan atau produk yang dibutuhkan kebanyakan dapat dengan mudah dan murah dan produk tersebut dapat memuaskan, artinya dengan kualitas barang yang bagus dan harga lebih terjangkau.

Keputusan-keputusan dalam menetapkan harga ini Koperasi Pegawai Setjen DPR RI harus mempertimbangkan kedua belah pihak dari segi Pegawai Setjen DPR yang menggigihkan keuntungan dengan pengembalian biaya-biaya operasional yang harus ditanggung dari pihak konsumen yang menggigihkan kualitas nomor satu dengan harga yang sangat murah.

Kaitanya dengan keputusan penerapan harga Toserba dan Pujasera Koperasi Pegawai Setjen DPR RI yaitu:

a) Sisi kemampuan, harga yang ditetapkan pada sisi kemampuan ini yaitu seberapa besar kemampuan para pembeli yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan atau gaji per bulan.

b) Sisi manfaat, yaitu manfaat dari suatu produk bagi tiap individu tidak sama dan kebutuhannya pun berbeda.

Dalam keadaan persaingan yang semakin tajam dewasa ini, dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar, penetapan harga dengan diskon-diskon itu mempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan dan

kemampuan perusahaan mempengaruhi konsumen¹².

c. Strategi Tempat

Dalam strategi pemasaran, adanya pemilihan lokasi usaha yang strategis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Semakin strategis lokasi usaha yang dipilih, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Begitu juga sebaliknya, jika lokasi usaha yang dipilih tidak strategis maka penjualan pun juga tidak akan terlalu bagus.

Dari segi tempat untuk Pujasera sudah cukup strategis dibandingkan dengan para pesaingnya dikarenakan Pujasera dekat dengan gedung

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Cucu Wahyu Zakaria, selaku Manager Sektor Riil Koperasi Setjen DPR RI

Setjen MPR maupun gedung Setjen DPR, hal ini menguntungkan Pujasera dibandingkan dengan pesaingnya yang lokasinya cukup jauh dari kedua gedung tersebut. Kemudian, untuk Toserba Koperasi Setjen DPR RI ini lah yang tidak cukup strategis dibandingkan dengan pesaingnya yaitu Toserba Koperasi Setjen MPR RI. Lokasi Toserba Koperasi Setjen DPR RI ini cukup di jauh, yaitu berada di dalam gedung wisma nusantara II sehingga hanya orang – orang yang berkunjung ke wisma nusantara II saja yang akan melihat Toserba Koperasi Setjen DPR RI hal ini berbeda dengan saingannya yaitu Toserba Koperasi Setjen MPR RI yang memiliki lokasi sangat strategis yaitu berada di antara gedung wisma nusantara I dan

II. Tentunya hal ini menjadi kelemahan bagi Toserba Koperasi Setjen DPR RI dikarenakan lokasi merupakan salah satu penentu kesuksesan dari sebuah usaha. Koperasi Setjen DPR RI pun mengakui bahwa tempat dari Toserba ini masih kurang strategis dibandingkan pesaingnya dikarenakan jika lokasinya strategis tentu akan meningkatkan pendapatan bagi koperasi yang akan berpengaruh bagi meningkatnya SHU serta kesejahteraan bagi anggotanya akan meningkat pula.

d. Strategi Promosi

Kasus-kasus manajemen mengajarkan bahwa perusahaan tidak lepas dari pengaruh luar (eksternal). Perusahaan pada dasarnya merupakan bagian

dari sistem lingkungan yang lebih luas. Artinya, kejadian-kejadian di luar perusahaan turut memengaruhi seluruh organisasi. Betapa tidak, setiap hasil produk memang untuk diperjual belikan atau di pasarkan. Dalam pemasaran, produk tersebut tidak akan lepas dari unsur promosi, dan promosi tersebut akan memudahkan penjualan terhadap sebuah produk. Karena produk yang dipromosikan akan lebih cepat dikenal oleh masyarakat, sehingga dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut.

Dalam Pujasera hal ini tidak menjadi tidak terlalu masalah, karena hanya menawarkan produk makanan yang tentunya makanan akan selalu dicari konsumen karena

merupakan kebutuhan pokok terutama jika di lingkungan instansi. Akan tetapi berbeda dengan Toserba Koperasi Setjen DPR RI yang menawarkan kredit barang dengan bunga 1.2% dari setiap barang yang akan di kredit.

Sebelum mengambil keputusan tentang promosi, Toserba Koperasi Setjen DPR RI dahulu mempertimbangkan promosi seperti apa, atau bagaimana promosi tersebut akan dilaksanakan yang sesuai produk yang akan dijual.

Oleh karena itu produk yang dijual Toserba Koperasi Setjen DPR RI merupakan produk elektronik, maka promosinya adalah:

Pertama: untuk founding (membuat produk-produk untuk promosi), strategi yang dilakukan

adalah menyebarkan brosur kepada anggota.

***Kedua:* untuk landing (turun langsung ke masyarakat) promosi yang dilakukan adalah menyampaikan dari mulut ke mulut, dan mengadakan bazar.**

Berapapun manfaatnya suatu produk, jika tidak dikenal oleh konsumen, maka produk tersebut tidak akan diketahui kemanfaatnya dan mungkin tidak dibeli oleh konsumen. Oleh karena itu Koperasi Setjen DPR RI harus berusaha mempengaruhi para konsumen untuk dapat menciptakan permintaan atas produk itu, dan kemudian dipelihara dan dikembangkan kegiatan pengiklanan yang dilakukan dengan rencana pemasaran secara keseluruhan serta

direncanakan akan diarahkan dan dikendalikan dengan baik. Diharapkan akan dapat berperan secara berarti dalam meningkatkan produk dan juga dapat mempertahankan ketenaran merk (brand). Jadi promosi merupakan usaha perusahaan untuk mempengaruhi calon pembeli atau konsumen, melalui pemakaian segala unsur acuan pemasaran.

1. *Segmentasi*

Perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaannya mempunyai tujuan tertentu, namun yang paling dominan adalah memiliki konsumen yang sebanyak-banyaknya secara efektif dan efisien. Sehingga perlu untuk membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar tersendiri yang dapat

mempermudah pemasaran terhadap suatu produk. Dengan kata lain, perkembangan suatu perusahaan tergantung bagaimana perusahaan mengelola usahanya, sehingga memiliki segmen-segmen pasar yang lebih banyak. Semakin banyaknya segmen pasar berarti banyak pula jumlah konsumen yang mengkonsumsi suatu produk.

Berikut variabel-variabel segmentasi yang utama yaitu:

a. Segmentasi geografis

Yaitu mengelompokkan pasar berdasarkan atas daerah atau wilayah yang penjualan produknya dipimpin oleh manajer marketing khususnya pemasaran produk Koperasi Setjen DPR RI yang ditunjuk untuk ke suatu tertentu yang bertanggung jawab atas konsumennya.

b. Segmentasi demografis

Pengelompokan pasar berdasarkan atas kelompok dan keadaan masyarakat yang berubah, agar diketahui besarnya target pasar dengan efisien. Segmentasi demografis Koperasi Setjen DPR RI pengelompokannya atas:

Pertama: Jenis kelamin

Segmentasi berdasarkan jenis kelamin ini sudah digunakan Toserba Koperasi Setjen DPR RI pada pemasaran produk pakaian, kosmetika (produk makanan)

Kedua : Pendapatan yang didapat per tahun tingkat pendapatan yang digunakan di Toserba Koperasi Setjen DPR RI

2. **Targetting (pasar sasaran)**

Dalam hal ini Toserba dan Pujasera Koperasi Setjen DPR RI menentukan pasar sasarnya

mengenai peningkatan daya beli kelompok masyarakat dan menarik perhatian konsumen. Karena Koperasi Kerena Koperasi Setjen DPR RI merupakan koperasi serba usaha yang berada di lingkungan instansi pemerintah maka pasar sasaran dari kedua sub unit riil ini adalah para pegawai lingkungan gedung MPR/DPR hal ini terlihat dari produk yang ditawarkan yaitu perdagangan kredit untuk barang elektronik dan alat-alat perlengkapan kantor serta perlengkapan untuk rumah tangga seperti sabun, kosmetik, makanan, dll.

Koperasi Setjen DPR RI mempunyai pasar sasarannya melalui berbagai macam produk elektronik dan perlengkapan rumah tangga serta makanan yang berada di Pujaser Koperasi. Kemudian mengarahkan sasaran pada para pegawai lingkungan Setjen,

anggota DPR dan masyarakat umum¹³.

3. *Positioning*

Penetapan produk merupakan tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu dan dapat diingat oleh konsumen.

Saat ini setiap produk yang beredar di pasaran menduduki tempat tertentu dalam segmen pasar. Hal ini terbukti dengan persepsi atau tanggapan konsumen mengenai posisi yang dipegang oleh setiap produk di pasar.

Koperasi Cahaya Amanah memposisikan perusahaannya melalui beberapa cara yaitu, dengan mengidentifikasi sejumlah keunggulan bersaing yang mungkin untuk membangun posisi, memilih keunggulan bersaing yang tepat, dan secara efektif

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Cucu Wahyu Zakaria, selaku Manager Sektor Riil Koperasi Setjen DPR RI

mengkomunikasikan serta menyampaikan posisi yang dipilih kepada pasar¹⁴.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai strategi pemasaran yang dilakukan oleh Koperasi Setjen DPR RI sub unit Toserba dan Pujasera sudah jelas bahwa ada beberapa kelemahan dari kedua sub unit tersebut meskipun jika melihat di SHU Koperasi Setjen DPR RI yang terus meningkat serta pendapatan dari kedua sub unit riil ini yang tidak pernah menurun akan tetapi tentunya jika strategi pemasaran yang digunakan lebih tepat akan meningkatkan pendapatan serta akan menarik lebih banyak konsumen dibandingkan dengan para pesaingnya yaitu Toserba Koperasi Setjen MPR RI dan Kantin Setjen

DPR RI yang menawarkan harga yang lebih murah, lokasi yang strategis, dan produk yang bervariasi. Dari hasil observasi yang telah penulis lakukan pun, jam buka dari Toserba Koperasi Setjen MPR RI ini lebih awal dibandingkan dengan Toserba Koperasi Setjen DPR RI serta jam tutup yang lebih lama hal ini pun menjadi salah satu penentu dari meningkatnya pendapatan Toserba.

DAFTAR PUSTAKA

- Sitio, arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Harsoyo, Y., dkk. 2006. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Swasta, Basu. 1999. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Cucu Wahyu Zakaria, selaku Manager Sektor Riil Koperasi Setjen DPR RI

Koetler, Phillip. 1989. *Manajemen*

Pemasaran Analisis Perencanaan

dan Pengendalian. Jakarta:

Erlangga.

Tjiptono, Fandy. 1997. *Strategi*

Pemasaran

Jasa. Yogyakarta: Andi.

Kartajaya, Hermawan dan Muh. Syukir

Sula. 2006. *Syari'ah Marketing*,

Cet, III. Bandung: Mizan.

ANALISIS TATA KELOLA KOPERASI PEGAWAI SEKRETRIAT JENDERAL DPR RI JAKARTA PUSAT TAHUN 2014-2015

Muhammad Irwan Fauzi*

Annisa Mahardhika Putri

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tata kelola Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta Pusat. Dalam membahas Tata kelola pada Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI meliputi beberapa indikator diantaranya Kepemilikan, Insentif, Kontrol administratif, Kepengurusan, Pemilihan Partner Usaha, Kontrak Hukum, Modal Sosial dan Kekuasaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan sejauh mana tata kelola koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi. Penelitian ini menggunakan data kualitatif secara empiris dengan melakukan wawancara dan mengamati data untuk mengetahui perkembangan koperasi tersebut. Penelitian ini menemukan tata kelola koperasi sampai saat ini berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Tata Kelola, Kepemilikan, Insentif, Kontrol administratif, Kepengurusan, Pemilihan Partner Usaha, Kontrak Hukum, Modal Sosial dan Kekuasaan.

* Muhammad Irwan Fauzi. Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Pendidikan Ekomomi Koperasi 2012, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220

** Annisa Mahardhika Putri. Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Pendidikan Ekomomi Koperasi 2012, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220

I. PENDAHULUAN

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Koperasi didefinisikan sebagai sebuah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang dikendalikan secara demokratis (ICA,1995). Koperasi didirikan oleh orang-orang yang berpikiran untuk mengejar kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan. Dari definisi tersebut sangat jelas koperasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi guna mencapai keuntungan yang diharapkan dapat mensejahterakan anggotanya. Namun harus diakui bahwa sampai saat ini perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di negara maju.

Koperasi di Indonesia pada umumnya sulit untuk maju dan berkembang, hal ini dikarenakan tata kelola koperasi umumnya masih sangat buruk. Tata kelola koperasi meliputi kepemilikan, kepengurusan, modal sosial, pemberian insentif, kontrak hukum, kontrol administratif, dan pemilihan partner usaha serta kekuatan koperasi itu sendiri. Banyak sekali masalah-masalah koperasi yang disebabkan oleh tata kelola koperasi yang buruk, hal ini terbukti banyak koperasi yang hilang dengan sendirinya, bahkan tidak jarang koperasi yang sudah berdiri lama namun tidak berkembang.

Untuk mengetahui sejauh mana tata kelola Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI, kami akan membahas secara rinci melalui penelitian ini.

II. Teori

A. Koperasi

Menurut ICA Koperasi adalah kumpulan orang – orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi

kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip – prinsip koperasi¹.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Indonesia, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan pada prinsip-prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan².

B. Tata Kelola

Tata Kelola adalah Rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.

C. Kepemilikan

Struktur kepemilikan dapat diklasifikasikan menjadi blok kepemilikan eksternal (external block ownership) dan blok kepemilikan internal (insider block ownership) atau kepemilikan manajerial (managerial block ownership). Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan mengimplikasikan adanya pengorbanan dalam penggunaan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan profit yang diperoleh, di mana kepemilikan yang tersebar akan mengurangi insentif bagi manajer untuk memaksimalkan profit. Dalam penelitian terbaru, struktur kepemilikan dihubungkan dengan kerangka legal. Pada negara yang perlindungan terhadap investornya lemah, pemusatan kepemilikan menjadi pengganti dari perlindungan legal.

¹Harsoyo, Y., dkk, Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 48

² *Ibid.*

D. Insentif

Menurut Mutiara S. penghargaan Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena prestasi melebihi standar yang ditentukan.³

E. Modal Sosial

Cohen dan Prusak (2001) mendefinisikan bahwa *social capital* merupakan suatu kesediaan melakukan hubungan aktif antara seseorang meliputi: kepercayaan, kerjasama yang saling menguntungkan, berbagi nilai dan perilaku yang mengikat setiap anggota jaringan dan kemasyarakatan juga kemungkinan membuat kerjasama.

F. Kepengurusan

Kata kerja mengurus (*management*) berasal dari bahasa Itali '*maneggiare*' yaitu 'menangani' dan kata nama ini diterbitkan daripada perkataan Latin – '*manus*' (*tangan*). Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Mary Parker Follet (1868 -1933) menyatakan bahwa pengurusan adalah sebagai seni untuk mencapai sesuatu melalui orang lain. Pengurus dalam koperasi adalah perangkat organisasi yang mempunyai kedudukan strategis dalam manajemen koperasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai mandat yang diberikan oleh rapat anggota.

G. Kontrak Hukum

Michael D Bayles mengartikan *contract of law* atau Kontrak hukum adalah *Might then betaken to be the law pertaining to enporcement of promise or agreement*. (Michael D.Bayles, 1987:143) Artinya, Kontrak Hukum adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.

³. Hujaimatul Fauziah " pengaruh insentif dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor di dinas bina marga balai besar pelaksanaan jalan nasional III SATKER pelaksanaan jalan nasional wilayah I Bandar Lampung" (Bandar Lampung : 2012), hlm 2

H. Pemilihan Partner Usaha

Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama⁴.

I. Kepemilikan

Struktur kepemilikan dapat diklasifikasikan menjadi blok kepemilikan eksternal (external block ownership) dan blok kepemilikan internal (insider block ownership) atau kepemilikan manajerial (managerial block ownership). Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan mengimplikasikan adanya pengorbanan dalam penggunaan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan profit yang diperoleh, di mana kepemilikan yang tersebar akan mengurangi insentif bagi manajer untuk memaksimalkan profit.

J. Kontrol Administratif

Kontrol Administratif (ADCON): Arah atau latihan otorisasi atas bawahan atau organisasi dalam hal untuk administrasi dan dukungan, termasuk organisasi layanan pasukan, kontrol sumber daya dan peralatan, manajemen personel, logistik unit, individu dan unit pelatihan, kesiapan, mobilisasi, demobilisasi, disiplin dan hal-hal lain yang tidak termasuk dalam misi operasional bawahan atau organisasi. Kontrol administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

K. Kekuasaan

Menurut House "Kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan dampak atau akibat pada orang lain". Menurut Bass "Kekuasaan adalah

⁴ Linton, L., 1995, Partnership Modal Ventura, Jakarta: PT. IBEC, h. 8

potensi untuk mempengaruhi orang lain”. Menurut Wagner dan Hollenbeck ”Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, dan kemampuan untuk mengatasi (bertahan dari) pengaruh orang lain yang tidak diinginkan”. Berdasarkan definisi – definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dalam hal perilaku agar perilaku tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

III. Metodologi Penelitian

a) Studi Area

Penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

b) Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada pengelola koperasi dan melihat data atau laporan pengurus Rapat Anggota Tahunan serta observasi langsung yang diselenggarakan untuk mengumpulkan informasi. Data tersebut akan dianalisis dengan metode kualitatif.

c) RuangLingkup penelitian

Penelitian ini pada koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta Pusat dengan mengamati tata kelola koperasi yang meliputi Kepemilikan, Insentif, Kontrol administratif, Kepengurusan, Pemilihan Partner Usaha, Kontrak Hukum, Modal Sosial dan Kekuasaan.

d) Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang secara deskriptif akan dijabarkan masalah tata kelola yang meliputi yang meliputi Kepemilikan, Insentif, Kontrol administratif, Kepengurusan, Pemilihan Partner

Usaha, Kontrak Hukum, Modal Sosial dan Kekuasaan koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta Pusat.

IV. Pembahasan dan Hasil

a. Kepemilikan

Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1985. Koperasi ini di dirikan dengan tujuan koperasi yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun kepemilikan koperasi ini adalah para anggota koperasi itu sendiri. Kemajuan koperasi tergantung pada anggotanya. Partisipasi anggota pada koperasi ini cukup baik hampir semua anggota merupakan anggota aktif yang sering melakukan simpan pinjam. Partisipasi anggota pada koperasi pegawai SETJEN DPR RI sangat terbuka dan sukarela. Koperasi pegawai SETJEN DPR RI sesuai dengan prinsip koperasi yaitu sukarela dan terbuka, artinya semua pegawai SETJEN DPR RI tidak dipaksakan untuk menjadi anggota koperasi pegawai SETJEN DPR RI, melainkan secara sukarela. Selain itu koperasi ini juga terbuka untuk lingkungan kantor SETJEN DPR RI, hal ini terbukti dengan adanya anggota luar biasa yaitu anggota yang bukan berasal dari pegawai SETJEN DPR RI.

Adapun hak dan kewajiban para anggota Koperasi diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada pasal 10 AD/ART Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI.

b. Insentif

Pada Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI usaha yang dilakukan untuk menunjang kegiatan koperasi baik simpan pinjam dan usaha dagang haruslah didasari dari tenaga kerja yang baik, cara untuk memotivasi kinerja karyawan dilakukan dengan memberikan insentif. Tujuan dari pelaksanaan insentif Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Adapun jenis insentif yang diberikan Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI, antara lain :

1. Finansial insentif

Finansial Insentif merupakan dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja meliputi gaji-gaji yang pantas, tetapi juga termasuk didalamnya kemungkinan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan dan soal-soal kesejahteraan. Pada koperasi SETJEN DPR RI Insentif ini diberikan pada saat Rapat Anggota Tahunan dimana pembagian keuntungan (SHU) diberikan beberapa persen untuk para pengurus, pengawas, manajer dan pegawai koperasi. Persentase atas pembagian dari SHU ini masing-masing ialah :

- a. Untuk pengurus dan pengawas masing-masing 10%
- b. Untuk Manajer dan pegawai koperasi (pengelola) 7%

Selain pembagian insentif berdasarkan SHU, Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI juga memberikan jenis finansial insentif pada bagian unit usaha dagang, khususnya perdagangan kredit, di Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI jenis insentif ini disebut sebagai insentif marketing. Pemberian jenis insentif ini dilakukan khusus untuk bagian penjualan barang yang dilakukan secara kredit, insentif ini diberikan jika marketing mampu menjual barang secara kredit melebihi target. Jika melebihi target, jumlah penjualan setelah target tersebut sebesar 2 % nya merupakan bagian untuk tim marketing perdagangan kredit.

2. Non finansial insentif

Non finansial insentif diberikan ketika keadaan pekerjaan yang memuaskan yang meliputi tempat kerja, jam kerja, tugas dan rekan kerja. Pada koperasi SETJEN DPR RI Insentif ini diberikan berdasarkan jam kerjanya hal ini agar mendorong para pengelola untuk lebih disiplin. Jumlah insentif yang diberikan untuk seluruh pengelola adalah sama yaitu sebesar Rp. 35.000,00. Insentif ini diberikan kepada pengelola dengan syarat sebagai berikut :

1. Harus melakukan absen paling lambat pukul 08.00, dan jika ada tugas di luar kota harus disertai dengan surat yang sah atau izin secara administratif.
2. Tidak boleh melakukan absen pulang sebelum pukul 16.00, dan jika ada tugas di luar kantor terpaksa harus kembali ke kantor untuk melakukan absen pulang.

C. Kontrol Administratif

Kontrol Administratif merupakan sebuah pengendalian yang dilakukan oleh koperasi pegawai SETJEN DPR RI untuk mencapai tujuan sekaligus melihat rangkaian kerja apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Kontrol administratif yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI adalah bentuk pengendalian berbasis perangkat IT, dimana dilakukan dengan bantuan teknologi untuk mengendalikan unsur-unsur yang ada dikoperasi seperti pengurus, pengawas, pengelola dan juga anggota koperasi.

Salah satu kontrol administratif yang dilakukan secara rutin adalah absensi pegawai koperasi. Absensi di kontrol oleh para manajer dan pengawas koperasi sebulan sekali, dengan berbasis teknologi sidik jari, pengawasan dapat dilakukan secara mudah dengan melihat data yang terlihat secara rinci pada sistem tersebut.

Pengendalian internal juga dilakukan oleh koperasi ini, maksud dari pengendalian internal ini adalah cara untuk mengawasi dan mengukur sumber daya yang ada pada koperasi. Dalam hal ini pengawas secara rutin setiap sebulan sekali melakukan

kontrol pada laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi adanya penggelapan dan melindungi sumber daya yang berwujud khususnya. Kontrol administratif ini dilakukan oleh para manajer terlebih dahulu kemudian dilakukan kembali oleh para pengawas. Semua unit usaha dilakukan pengendalian internal mulai dari unit simpan pinjam dimana diperiksa laporan keuangannya sebulan satu kali. Pada unit sektor riil yaitu TOSERBA diperiksa persediaan barang dagangnya, penataan barang dan pelayannya seminggu sekali oleh manajer dan pemeriksaan laporan keuangan oleh pengawas dilakukan sebulan sekali. Begitu juga dengan unit usaha lainnya seperti percetakan dan foto copy serta Pujasera. Pengendalian internal ini dilakukan bukan hanya untuk melindungi pada sumber daya yang berwujud seperti kas, barang-barang dan gedung tetapi juga pada sumber daya yang tak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Selain itu kontrol administratif dilakukan secara rutin yang diselenggarakan oleh pengawas dimana dengan mengadakan rapat internal pengawas dan pengurus dalam forum rapat gabungan untuk membahas laporan triwulan kegiatan pengelolaan koperasi. Kontrol administratif yang dilakukan oleh koperasi ini berguna sebagai bahan yang dapat dijadikan evaluasi atau penilaian untuk membuat suatu pertimbangan guna menciptakan kebijakan baru yang lebih efektif dan efisien untuk kepentingan bersama yang lebih baik lagi demi berkembangnya dan majunya Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI.

d. Kepengurusan

Kepegurusan Koperasi pegawai SETJEN DPR RI diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada pasal 18 – 36 yang secara umum isinya adalah sebagai berikut :

1. Pengurus

Pengurus Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI terdiri dari satu ketua, satu wakil ketua dan sebanyak-banyaknya tiga anggota pengurus. Pasangan calon ketua dan Wakil ketua dipilih secara langsung dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Anggota pengurus koperasi dipilih dan ditetapkan oleh ketua dan wakil ketua terpilih. Tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan atau peraturan khusus.

2. Pengelola

Pengelola adalah pegawai koperasi yang diangkat oleh pengurus atas persetujuan Rapat anggota sebagai Manajer Koperasi. Manajer koperasi dapat terdiri lebih dari seorang bergantung pada kebutuhan koperasi dan bertanggung jawab kepada pengurus.

3. Pengawas

Pengawas Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI terdiri dari satu ketua, satu wakil ketua dan satu anggota pengawas. Ketua dan wakil ketua pengawas koperasi dipilih secara langsung dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Anggota pengawas koperasi dipilih dan ditetapkan oleh ketua dan wakil ketua pengawas terpilih. Tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua pengawas koperasi diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

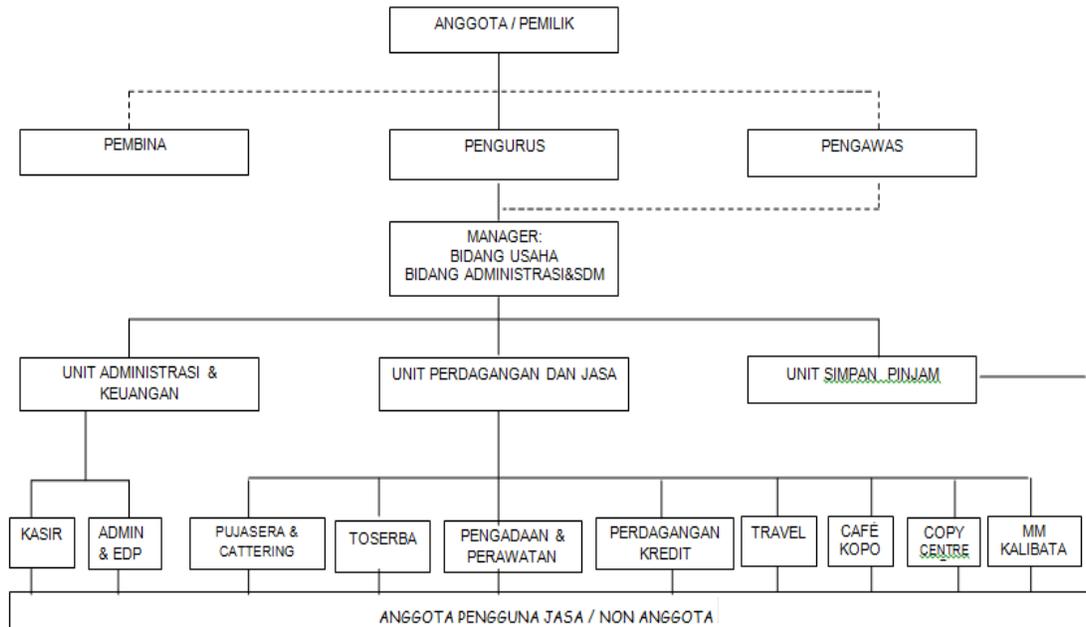
4. Badan Pembina

Upaya untuk memajukan kesejahteraan anggota yang dilakukan koperasi pada dasarnya sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Setjen DPR RI oleh karena itu bagi kepentingan koperasi, rapat anggota dapat membentuk badan Pembina. Badan Pembina yang dimaksud terdiri dari :

- a. Sekretaris Jenderal DPR RI selaku ketua

- b. Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI selaku wakil ketua, merangkap anggota.
- c. Ketua KORPRI unit SETJEN DPR RI selaku sekretaris merangkap anggota.

Dari penjelasan mengenai kepengurusan dalam Koperasi Pegawai Setjen DPR RI, dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



e. Pemilihan Partner Usaha

Pemilihan partner usaha yang dilakukan oleh Koperasi pegawai SETJEN DPR RI di dasari dengan pertimbangan yang baik, sehingga dengan adanya partner usaha koperasi SETJEN DPR RI dapat memperoleh keuntungan. Pemilihan partner usaha yang dilakukan oleh SETJEN DPR RI memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Prinsip ini lah yang digunakan koperasi pegawai SETJEN DPR RI untuk mengembangkan usaha. Oleh Karena itu untuk mengembangkan usahanya koperasi pegawai SETJEN DPR RI memilih mitra usahanya dengan berbagai pertimbangan, di antaranya :

1. Aspek Legalitas dan Material

Legalitas yang dimaksud disini adalah perusahaan tersebut mempunyai izin dalam mendirikan usaha secara jelas dan diakui oleh negara sebagai perusahaan. Aspek legalitas ini dipandang penting oleh Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI karena merupakan hal yang sangat penting dimana jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan hukum maka bisa di selesaikan secara mudah. Selain itu legalitas suatu perusahaan dapat juga menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap mitra usaha.

Aspek material disini adalah Koperasi pegawai SETJEN DPR RI memilih partner usahannya dengan melihat material yang ada pada perusahaan tersebut yaitu mengenai kualitas dan kuantitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Hal ini sangat penting karena dapat membuat lebih jelas dan mengetahui kualitas dan kuantitas yang dapat diberikan mitra usaha terhadap koperasi SETJEN DPR RI.

2. Keterbukaan atau *transparancy*

Dalam memilih partner usaha nya koperasi pegawai SETJEN DPR RI sangat memperhatikan keterbukaan atau *transparency*. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti kecurangan, selain itu keterbukaan sangat penting agar tidak ada hubungan yang *assymetris* antar kedua pihak yang dapat menyebabkan kesalahan dalam menganalisis dan pengambilan keputusan.

3. Saling menguntungkan atau *mutual benefit*.

Dalam memilih partner atau mitra usaha pasti dilandasi untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu agar perkembangan usaha koperasi dapat berkembang pesat, tentunya harus memilih mitra usaha yang dapat menguntungkan satu sama lain, sehingga dengan adanya partner usaha baik kedua perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan adanya kerjasama tersebut. Hal

ini lah yang dilakukan oleh Koperasi pegawai SETJEN DPR RI dalam melakukan kerja sama dengan perusahaan lain.

Adapun perusahaan yang pernah menjalin kerja sama atau sebagai mitra usaha dari koperasi pegawai SETJEN DPR RI antara lain :

a. Mitra Usaha pada unit simpan pinjam

Mitra Usaha pada unit simpan pinjam adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang dipilih adalah lembaga keuangan bank. Koperasi pegawai SETJEN DPR RI sejak tahun 2003 sudah bekerja sama dengan bank guna menambah modal kerja pada unit simpan pinjam. Pada tahun 2003 sampai 2004 bank yang dijadikan mitra usaha koperasi ini adalah Bank Muamalat. Selanjutnya tahun 2005 Bank Mega syariah. Setelah itu mitra usaha pada unit simpan pinjam selanjutnya adalah Bank Mandiri Syariah yang dilakukan mulai dari tahun 2006 sampai sekarang. Bank Mandiri Syariah merupakan mitra usaha yang paling menguntungkan baik bagi unit simpan pinjam sendiri khususnya maupun koperasi pegawai SETJEN DPR RI umumnya.

b. Mitra usaha pada unit usaha dagang

Mitra pada unit usaha dagang pada sub unit travel Pada tahun 2014 memberikan kontribusi keuntungan sebesar Rp. 56.111.200,00. Pencapaian keuntungan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 12.202.350,00 atau meningkat signifikan yaitu sebesar 27,79% dari tahun sebelumnya. Unit Usaha ini sangat diperlukan sebagai bagian pemberi kontribusi pendapatan terhadap koperasi, apalagi memperhatikan potensi pasar yang ada dilingkungan DPR/MPR/DPD maupun potensi pasar yang bersifat *walk in costumers*. Namun selain padat modal, karakteristik bisnis travel adalah harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki skill khusus dan perizinan yang spesifik. Sehingga

sampai saat ini kegiatan usaha koperasi masih melakukan kerja sama dengan mitra kerja yang sudah eksis dan kapabel dalam sektor travel.

f. Kontrak Hukum

Koperasi pegawai SETJEN DPR RI tentunya melaksanakan Kontrak Hukum. Kontrak hukum yang dimaksud disini adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan antar semua pihak yang terlibat pada koperasi ini. Kontrak hukum mengatur tentang bagaimana hak dan kewajiban atau sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh seluruh pihak atau unsur-unsur yang ada pada koperasi ini, mulai dari pengawas, pembina, pengurus, pengelola dan para anggota serta mitra usaha yang semuanya di atur dalam Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga (AD/ART) Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI.

Kontrak hukum secara jelas tercantum pada AD/ART Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI mulai dari Keanggotaan Rapat Anggota, Kepengurusan, Simpanan dan tabungan, Pembukuan dan SHU, serta Pembubaran koperasi. Dari semua kontrak hukum yang dibuat secara jelas dan terperinci hanya pinjaman dan perdagangan yang belum dicantumkan pada AD/ART Koperasi pegawai SETJEN DPR RI. Namun hal itu sudah terpenuhi dengan dibuatnya kontrak hukum secara tertulis oleh pihak yang terlibat. Seperti pinjaman, dalam melakukan pinjaman pada koperasi pegawai SETJEN DPR RI, unit usaha simpan pinjam ini menjelaskan secara tertulis dan lisan mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para anggota yang meminjam di koperasi ini. Hal itu juga dilakukan pada unit usaha perdagangan khususnya pada perdagangan kredit.

g. Modal Sosial

Modal sosial pada Koperasi pegawai SETJEN DPR RI cukup baik. Terlihat dari sikap kekeluargaan antar pengurus, pengelola bahkan dengan anggota sangat terlihat. Kekeluargaan merupakan salah satu indikator dari modal sosial. Untuk mengidentifikasi secara jelas bahwa modal sosial dalam koperasi pegawai SETJEN DPR RI penulis melakukan penelitian dengan cara mengamati kinerja pada koperasi ini sekaligus wawancara pada saat melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL).

Modal sosial menjelaskan suatu hubungan atau jaringan kerja, kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan suatu manfaat.

Jaringan kerja antara pembina dengan pengurus dan pengelola koperasi pegawai SETJEN DPR RI sangat baik, semua kegiatan dapat dikordinasikan secara baik bahkan dengan cara yang mudah atau hanya secara verbal melalui komunikasi secara langsung, hal itu terbentuk karena adanya kepercayaan antar pengurus, pembina, pengelola bahkan anggota koperasi, oleh karena itu hal ini dapat digunakan untuk memfasilitasi kordinasi dan kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan bersama di koperasi pegawai SETJEN DPR RI.

Adapun bentuk sosial yang dilaksanakan koperasi pegawai SETJEN DPR RI adalah *Social Capital Micro Level*. Pada tingkatan *social capital micro level* ini menekankan kemampuan individu untuk mengerahkan sumber daya melalui institusi jaringan lokal seperti organisasi sosial kemasyarakatan yang didasarkan pada kekeluargaan. Banyak ahli yang menekankan bahwa *Social Capital Micro Level* pada sebuah organisasi berhubungan dengan pengenalan, koperasi dan kerjasama, kesetiakawanan, kesetian, reputasi dan akses informasi yang informatif. Seperti yang telah dijelaskan diatas koperasi pegawai SETJEN DPR RI sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan dimana antar Pembina, pengurus dan pengelola serta anggota saling percaya

satu sama lain. Pada koperasi pegawai SETJEN DPR RI modal sosial juga terlihat dari kepercayaan yang diberikan pada para pedagang yang merupakan anggota luar biasa dari Koperasi Pegawai Setjen DPR RI, pedagang sangat percaya terhadap pengelolaan pujasera yang terlihat dari simpanan pokok anggota luar biasa yang jumlahnya jauh lebih besar dari anggota, selain itu para anggota luar biasa terutama pada pedagang di pujasera mempercayakan bahwa koperasi dapat menjaga persaingan antara para pedagang di pujasera, hal ini salah satu bentuk kepercayaan dimana koperasi melarang para pedagang untuk menjual produk yang sama.

h. Kekuasaan

Kekuasaan pada koperasi pegawai SETJEN DPR RI berada pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam hal ini kekuasaan dipegang oleh seluruh anggota namun tidak termasuk anggota luar biasa. Anggota koperasi mempunyai hak atau kekuasaan yang sama dalam rapat anggota tanpa melihat besarnya jasa dari masing-masing anggota. Anggota mempunyai hak yang sama yaitu satu orang satu suara (*one men one vote*). Sejak berdirinya koperasi ini rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dimana semua keputusan diputuskan pada rapat anggota tahunan.

Kekuasaan pada koperasi SETJEN DPR RI bergantung pada rapat anggota, anggota mempunyai peranan yang sangat penting untuk menggunakan suaranya atau haknya dalam mengatur dan mempengaruhi sebuah kebijakan atau aturan-aturan dengan kesepakatan yang jelas mengenai jalannya usaha-usaha yang akan dilakukan oleh koperasi pegawai SETJEN DPR RI.

Jenis kekuasaan yang ada pada koperasi pegawai SETJEN DPR RI ini adalah jenis kekuasaan yang bersumber dari suatu kelompok yaitu para anggota koperasi pegawai

SETJEN DPR RI kecuali anggota luar biasa. Hal ini merupakan suatu kekuasaan para anggota dalam mempengaruhi seluruh kebijakan atau keputusan yang sepakati pada rapat anggota

V. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa tata kelola pada Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI sangat berjalan dengan baik. Tata kelola pada koperasi Pegawai SETJEN DPR RI, meliputi beberapa hal diatas, dimana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemilikan koperasi ini terletak pada anggotanya sendiri yaitu pemilik koperasi dimana mempunyai kedudukan paling tinggi.
2. Pemberian insentif diberikan untuk pengawas, pengurus dan pengelola dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kedisiplinan pegawai.
3. Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI sangat memperhatikan kontrol administratif dimana selalu melakukan pengendalian atau pengawasan secara internal dengan memeriksa laporan keuangan dan melihat kedisiplinan para anggota.
4. Kepengurusan koperasi sudah berjalan dengan baik dimana kedudukan yang paling tinggi berada pada rapat anggota yang semua kebijakan harus melalui kesepakatan para anggota. Selain itu kepengurusan koperasi ini juga di atur secara rinci pada AD/ART koperasi yang meliputi Pembina, pengawas, pengurus dan pengelola serta para anggota dan anggota luar biasa.
5. Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI juga memiliki mitra usaha, dimana pemilihannya dilakukan dengan berbagai pertimbangan diantaranya : Aspek legalitas dan Material, Keterbukaan atau *transparency* dan Saling menguntungkan atau *mutual benefit*.
6. Kontrak hukum secara jelas tercantum pada AD/ART Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI mulai dari Keanggotaan Rapat Anggota, Kepengurusan, Simpanan dan tabungan,

Pembukuan dan SHU, serta Pembubaran koperasi. Dari semua kontrak hukum yang dibuat secara jelas dan terperinci hanya pinjaman dan perdagangan yang belum dicantumkan pada AD/ART Koperasi pegawai SETJEN DPR RI. Namun hal itu sudah terpenuhi dengan dibuatnya kontrak hukum secara tertulis oleh pihak yang terlibat.

7. Modal Sosial terlihat jelas pada Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI dimana sangat terlihat kerjasama, kesetiakawanan, kesetiaan, reputasi dan akses informasi yang informatif pada koperasi ini.
8. Kekuasaan pada koperasi pegawai SETJEN DPR RI berada pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam hal ini kekuasaan dipegang oleh seluruh anggota namun tidak termasuk anggota luar biasa. Anggota koperasi mempunyai hak atau kekuasaan yang sama dalam rapat anggota tanpa melihat besarnya jasa dari masing-masing anggota. Anggota mempunyai hak yang sama yaitu satu orang satu suara (*one men one vote*). Sejak berdirinya koperasi ini rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dimana semua keputusan diputuskan pada rapat anggota tahunan.

Daftar Pustaka

- Syahrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Mutis, Thoby. 2004. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta : PT.Gramedia
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Pachta W, Andjar dkk. 2007. *Hukum koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana
- Sitio, arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi : Teori dan Praktik*. Jakarta :Erlangga
- Harsoyo, Y., dkk. 2006. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama

ANALISIS SWOT Annisa Mahardhika Putri

1. Strength

- Nama yang telah dikenal luas oleh masyarakat dikarenakan terdapat nama DPR RI menjadikan nilai lebih agar dipercayai oleh masyarakat luas.
- Koperasi Setjen DPR RI telah memenangkan banyak penghargaan yang salah satunya merupakan DEKOPIN AWARD dan hal ini menjadikan bahwa koperasi telah menjalankan fungsinya dengan baik sehingga mendapatkan penghargaan yang bergengsi ini.
- Koperasi SETJEN DPR RI merupakan koperasi dengan asas yang terbuka dikarenakan tidak hanya kalangan pegawai SETJEN ataupun anggota DPR yang bisa menjadi anggotanya tetapi masyarakat di luar lingkungan SETJEN DPR RI bisa menjadi anggotanya.

2. Weakness

- Pemasaran produk dari sub unit riil kurang maksimal sehingga pemasukan paling besar masih dari sub unit simpan pinjam.
- Pencairan dana di unit simpan pinjam membutuhkan waktu yang sangat lama yaitu 3 bulan.
- Masih kurangnya pegawai di unit sub unit riil sehingga kerja pegawai dirasa masih kurang maksimal

3. Opportunity

- Koperasi SETJEN DPR RI bekerja sama dengan Bank Mandiri Syariah di unit simpan pinjam sehingga hal ini akan memudahkan koperasi jika ada anggota yang meminjam uang dan hal ini menjadikan kesempatan bagi koperasi agar dapat menambah pendapatan.

4. Threat

- Penawaran kredit dari bank lain yang dirasa lebih mudah dan cepat dalam pencairan dana.
- Ancaman dari pesaing minimarket dan pujasera di lingkungan DPR yang menawarkan harga yang lebih murah serta jam buka yang lebih pagi.

**POSISI KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI JAKARTA
PUSAT DALAM TABEL WILIAMSON**

No	INDIKATOR TATA KELOLA	KETERANGAN
1	Kepemilikan	Milik Bersama
2	Kewenangan	Kuat
3	Intensif	Cukup Kuat
4	Kepengurusan	Kuat
5	Partership	Kuat
6	Administrasi Kontrol	Kuat
7	Kontrak Hukum	Cukup Kuat
8	Modal Sosial	Cukup Kuat